DINAMIKA KEPEMIMPINAN LOKAL DI DAERAH TRANSMIGRASI NAGARI DESA BARU PASAMAN BARAT (1954-2000)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora Sebagai Persyaratan untuk
Meraih Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Program Sejarah Peradaban Islam

Oleh:

RAIDA YANI
NIM. 2211020056

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1448 H/ 2026 M

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Raida Yani
NIM	: 2211020056
Tempat tanggal lahir	: Air Bangis, 13 Juli 2003

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul " Dinamika Kepimimpinan Lokal di daerah transmigrasi Nagari Desa baru, Pasaman Barat 1954-2000" ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan saya menyatakan bahwa saya tidak terlibat dalam tindakan plagiarisme, pencurian karya orang lain atau memanfaatkan hasil karya orang lain untuk keuntungan pribadi, baik secara material maupun non-material. Kecuali yang dicantumkan sumbernya. Jika dimasa yang akan datang terdapat kekeliraun dan ketidaksesuaian antara fakta dan realitas, saya siap untuk bertanggung jawab dan mengikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh fakultas.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 02 September 2026

Saya yang menyatakan



Raida Yani

NIM. 2211020056

Scanned with CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah Skripsi dengan judul **" Dinamika Kepimimpinan Lokal di daerah transmigrasi Nagari Desa baru, Pasaman Barat 1954-2000"** yang ditulis oleh Raida Yani, NIM. 2211020056 Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang,02 September 2026

Pembimbing 1,

Dr. M. Ilham, S.Ag., S.Sos., M.Hum
NIP. 197306111999031002

Pembimbing 2,

Dr. Asrif, MA
NIP.197707112009121003

Scanned with CamScanner

PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Skripsi dengan judul " **Dinamika Kepimimpinan Lokal di daerah transmigrasi Nagari Desa baru, Pasaman Barat 1954-2000"** yang ditulis oleh Raida Yani, NIM. 2211020056 Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, hari Selasa 15 September 2026, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam.

Padang, 24 September 2026

Penguji

Ketua

Dr. M. Ilham., S.Ag., S.Sos.,M.Hum
NIP. 197306111999031002

Sekretaris

Dr. Asril, MA
NIP. 197707112009121003

Anggota

Penguji 1

Dr. Erasiah., S.Hum.,MA
NIP. 198105152007102006

Penguji 2

Hj. Um R. Humairah, M.Pd
NIP. 197109122000032002

Mengesehkan,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Prof. Dr. Taufiqurrahman, M.Ag., M.Hum
NIP. 197009151994031003

Scanned with CamScanner

ABSTRAK

Raida Yani NIM. 2211020056. *"Dinamika Kepemimpinan Lokal di Daerah Transmigrasi Nagari Desa Baru Pasaman Barat (1954–2000)." Skripsi. Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2026.* Penelitian ini mengkaji dinamika kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, sebuah nagari yang terbentuk dari proses kolonisasi dan transmigrasi sehingga dihuni masyarakat multietnis Jawa, Mandailing, dan Minangkabau. Masalah pokok penelitian adalah keunikan struktur kepemimpinan nagari yang secara adat idealnya dipegang penghulu bersuku asli Minangkabau, namun di Desa Baru jabatan Wali Nagari maupun Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) justru dipegang tokoh etnis pendatang, khususnya Jawa. Penelitian bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis dinamika kepemimpinan lokal tahun 1954–2000 serta dampaknya terhadap struktur sosial dan hubungan antaretnik. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi/sintesis, dan historiografi, dengan sumber primer berupa wawancara terhadap sembilan informan (tokoh masyarakat, tokoh adat, mantan kepala desa/wali nagari, dan ketua KAN) serta dokumen monografi nagari, dilengkapi sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan skripsi terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi etnis Jawa dalam kepemimpinan telah berakar sejak masa kolonial melalui jabatan Kepala Bedeng, berlanjut pada fase Nagari lalu beralih ke Desa, sebelum akhirnya bergeser ke etnis Mandailing menjelang Reformasi melalui mekanisme pemilihan demokratis. Tidak ditemukan resistensi terbuka terhadap dominasi etnis pendatang; resistensi yang muncul bersifat kultural-simbolis berupa upaya mempertahankan kelembagaan KAN di tengah penyeragaman sistem desa. Dampaknya terhadap struktur sosial mencakup ketiadaan konflik tanah ulayat, tingginya angka perkawinan silang antaretnis, dan kuatnya tradisi gotong royong lintas etnis. Penelitian ini berimplikasi memperkaya historiografi lokal mengenai relasi kepemimpinan adat dan etnisitas di daerah transmigrasi, serta menawarkan model pembelajaran integrasi sosial multietnis di Indonesia.

Kata kunci: kepemimpinan lokal, transmigrasi, Nagari Desa Baru, hubungan antaretnik, Pasaman Barat

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur ku persembahkan kepada sang penguasa setiap hamba, sang penyejuk hati yang tergamang, sang penerang dalam setiap gelap gulita yang memandang, Allah SWT. Berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Dinamika Kepemimpinan lokal di daerah Transmigrasi nagari Desa Baru, Pasaman Barat (1954-2000)," ini tepat pada waktunya. Tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan lantunan doa *Allahuma shali`alaa sayyidina Muhammad wa`alaa alihi wa ashhabihi ajma`in,* yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan nuansa islami seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga ke alam yang berilmu pengetahuan yang selalu memberikan suri tauladan kepada umatnya.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) program Strata Satu (S1) pada Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol

Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda tercinta Pasril dan umak tersayang Yesneti, dengan lantunan do'a dan harapan yang selalu menemani langkah penulis dalam penyelesaian Skripsi ini, keberhasilan penulis hari ini berkat dibalik do'a yang tulus dari mereka, terimakasih kepada tujuh saudara penulis Kuya Syafwan, Abang Dino dan kakak tersayang Rahmadayani berkatnya penulis dapat merasakan bangku perkuliahan ini, yang dulunya terasa jauh dari impian yang akan penulis gapai, namun ternyata penulis sampai pada tahap ini, dan terimakasih kepada adek-adekku Tio annavi, Fauzan Fadris dan Hakimul Fikri yang memberikan canda tawa serta warna warni dan juga kekuatan dalam diri penulis, terimakasih kepada kakak ipar penulis Uni Yutit dan keponakan penulis Zunaira dalam turut mendukung penulis. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.pd., Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag. dan Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas serta memberikan kesempatan dalam menuntut ilmu selama belajar di UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Adab dan Humaniora yang sudah meyediakan waktu dan tenaga dalam melengkapi infrastruktur berupa

menyediakan waktu yang penulis butuhkan selama proses perkuliahan dan juga motivasi.

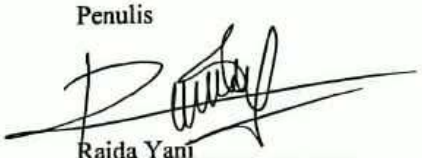
3. Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam Ibu Dr. Erasiah, MA dan sekretaris program Sejarah Peradaban Islam ibu Umi Rusmiani Humairah, S. Hum, MA dan terimakasih banyak telah memberik bimbingan serta dorongan dan juuga motivasi terbaik kepada penulis selama ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Ilham, S.Ag, S.Sos., M.Hum selaku pembimbing akademik yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis setiap saat.
5. Dr. Muhammad Ilham, S. Ag, S. Sos., M. Hum selaku pembimbing I dan Dr. Asril, MA selaku pembimbing II yang sudah membimbing dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya yang telah membantu mengarahkan penulis setiap saat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen Sejarah peradaban Islam yang sudah memberikan ilmunya kepada penulis sejak awal kuliah sampai tahap penulisan skripsi ini, semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi amal jariyah nantinya.
7. Pimpinan perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora yang telah memberikan kemudahan pada penulis selama menjalankan tahap skripsi ini, perpustakaan UIN imam Bonjol Padang, segenap karyawan dan pegawai perpustakaan di Fakultas Adab dan Humaniora
8. Terimakasih penulis ucapkan kepada semua guru-guru MAN 2 Bukittinggi, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk duduk dibangku perkuliahan ini.

9. Terimakasih yang tak terhingga kepada kakak tercinta Rahmadayani seorang perempuan yang telah menjadi tameng disetiap penulis kuliah, disetiap langkah dan capaian ini tidak lepas dari semangat dan serta dorongan darinya.
10. Teruntuk sahabatku Nur Rahmania terimakasih telah hadir di setiap langkah dan juga proses penulis, yang menemani penulis mulai dari awal masuk diperguruan tinggi ini hingga penulis selesai kuliah dan tidak lupa kepada Beca yang telah menemani peroses penulis.
11. Sahabatku Yesi, Rahmadani Triwil Yanti, Nur Winda, Dian Fitra Sari Khairita, Hilya Syahira, yang selalu ada disaat masa-masa penulis dalam melakukan skripsi, teman-teman SPI B terima kasih atas pertemuan yang sangat berkesan di masa perkuliahan semoga kalian semua sukses, seluruh teman-teman, adek-adek kost Maskan Mar'ah, Saqu 2 Siti aisyah yang memberikan kehangatan warna warni di sela-sela penulis melakukan skripsi ini.
12. terimakasih untuk semua orang yang telah hadir dalam hidup penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua yang penulis temui diberi kesehatan, *Aamiin yarobal 'alamin.*
13. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada diri penulis yang telah kuat disetiap langkah kecil ini hingga penulis sampai pada tahap ini.

Akhirnya sepucuk do'a penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpatisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara materil maupun inmateril, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas

kebaikan, dukungan dan kerja samanya, semoga menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan Penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Amin ya Rabb.

Padang, 16 Agustus 2026
Penulis



Raida Yani
NIM. 2211020056

Scanned with CamScanner

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan dan Batasan Masalah 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 12
D. Penjelasan Judul 13
E. Tinjauan Pustaka 16
F. Metode Penelitian 25
G. Sistematika Penulisan 31

BAB II MONOGRAFI NAGARI DESA BARU PASAMAN BARAT

A. Geografis dan Sejarah Nagari Desa Baru Pasaman Barat 33
B. Kondisi Sosial dan Agama 41
C. Pendidikan, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat Nagari Desa Baru 43

BAB III DINAMIKA KEPEMIMPINAN LOKAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUBUNGAN ANTAR ETNIK

A. Dinamika Kepemimpinan Lokal di Nagari Desa Baru Tahun 1954–2000 47

1. Struktur Kepemimpinan pada fase wali nagari (1950-1979) 54
2. Kepemimpinan pada fase peralihan sistem Nagari ke Desa serta dinamika pergantian etnis kepemimpinan (1979-2000) 55
3. Peralihan fase pemerintahan nagari (1998-2000) 59

B. Dampak Dinamika Kepemimpinan Lokal terhadap Struktur Sosial dan Hubungan Antaretnik Tahun 1954-2000 61

1. perkawinan silang dan penguasaan multibahasa sebagai perekat sosial 62
2. ketiadaan konflik tanah ulayat dan mekanisme penyelesaian sangketa 63
3. gotong royong dan modal sosial dalam menjaga harmoni 64

4. dampak kepemimpinan terhadap pembangunan masyarakat.....66

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 68
B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi geografis di Nagari Desa Baru..... 33

Tabel 2.2 Daftar Kronologis Pemimpin Nagari / Desa Baru 1950-2025 38

Tabel 2.3 Sarana Peribadatan Nagari Desa Baru Tahun 2025 42

Tabel 2.4 Sarana Pendidikan Nagari Desa Baru Tahun 2025 43

Tabel 3.1 Struktur Kepemimpinan Lokal Masa Kolonial di Kawasan Desa Baru, 1938-1954..... 48

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan lokal merupakan salah satu kedudukan penting dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang terbentuk dari proses migrasi dan pertemuan berbagai kelompok etnis. Dalam konteks tersebut, Pemimpin lokal tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai simpul yang menjaga tatanan sosial, mengatur relasi antar warga, serta mewakili keberadaan legitimasi suatu komunitas di hadapan negara maupun masyarakat sekitarnya.[1]

Dalam masyarakat yang bersifat multietnis, Keberadaan kepemimpinan lokal menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan persoalan mengenai siapa yang memperoleh kewenangan untuk memimpin, tetapi juga menyangkut proses terbentuknya legitimasi seorang pemimpin di tengah masyarakat. Selain itu, kepemimpinan lokal turut memberikan pengaruh terhadap pola hubungan, interaksi, dan dinamika yang berkembang di antara kelompok-kelompok etnis yang hidup berdampingan dalam suatu wilayah.[2]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[1] Kartini kartono, *pemimpin dan kepemimpinan: apakah kepemimpinan abnormal itu*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 6.

[2] Abdul Halim, Sosiologi Halim, *Sosiologi Politik etnik : Studi Otoritas dan Demokrasi Lokal Masyarakat Madura,* (Malang : Intelegensi Media, 2019),

Salah satu fenomena yang melahirkan masyarakat multietnis di Indonesia adalah program transmigrasi. kebijakan transmigrasi merupakan program penting pemerintah Indonesia yang telah dilaksanakan sejak era kolonial hingga pasca kemerdekaan, bertujuan untuk mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, meratakan pembangunan, serta memanfaatkan sumber daya di luar Jawa. Program ini mendorong migrasi penduduk, khususnya etnis Jawa, ke berbagai pulau seperti; Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.[3] Perpindahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga memengaruhi struktur sosial, budaya, serta pola kekuasaan dan kepemimpinan di daerah tujuan.[4] Di berbagai daerah, transmigrasi mengubah desa-desa yang awalnya homogen secara etnis menjadi masyarakat multietnik dengan dinamika hubungan sosial yang lebih kompleks, termasuk potensi integrasi maupun konflik antar kelompok.[5]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam konteks dinamika sosial, transmigrasi dipandang sebagai salah satu faktor yang mampu menggeser struktur sosial tradisional.[6] Kedatangan penduduk baru memunculkan pola-pola interaksi, jaringan

[3]Eni May, "Potret 3 Desa Transmigrasi Orang Jawa: Studi Kasus di Desa Tongar, Koja dan Desa Baru Pasaman Sumatera Barat" (Laporan Penelitian, Universitas Andalas, Padang, 2006): hlm. 2.

[4]Yoso Nova, "Dampak Transmigrasi terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan,* Vol. 5, no. 1 (Januari–Juni 2016): hlm. 24.

[5] Abdul Hafid, "Hubungan Sosial Masyarakat Multietnik di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan," *Jurnal Al-Qalam,* Vol. 22, no. 1 (Juni 2016): hlm. 256–268.

[6] Pierre Spitz, "Transmigrasi di Indonesia: Kasus Lamtoron," *Pembangunan dan Perubahan* Vol. 13, no. 2 (1982): hlm. 249–276.

sosial, dan struktur stratifikasi yang berbeda dari sebelumnya.[7] Pergeseran tersebut seringkali menuntut penyesuaian antara penduduk lokal dan pendatang, baik dalam hal budaya, ekonomi, maupun politik lokal. Di satu sisi, transmigrasi dapat mendorong integrasi dan kerja sama yang saling menguntungkan.[8] Di sisi lain, ia juga menyimpan potensi konflik dan resistensi, terutama ketika menyangkut perebutan sumber daya, akses terhadap lahan, dan posisi dalam struktur kekuasaan lokal.[9]

Provinsi Sumatera Barat, yang secara kultural dikenal sebagai wilayah adat Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal dan struktur pemerintahan nagari yang khas, turut menjadi salah satu daerah tujuan program kolonisasi tersebut. Program ini telah dirintis sejak masa kolonial, yakni sekitar tahun 1936, ketika sejumlah penduduk asal Jawa Tengah dan Jawa Timur didatangkan untuk dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit Ophir, Kinali.[10] Program kolonisasi ini kemudian berlanjut ke wilayah lain di Sumatera Barat, termasuk ke Kabupaten Pasaman, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang memandang wilayah Pasaman cocok dijadikan lokasi transmigrasi karena kepadatan penduduknya yang relatif rendah serta kondisi alamnya yang sesuai untuk pertanian.

UIN IMAM BONJOL PADANG

---

[7] Riwanto Tirtosudarmo, *"Program Transmigrasi Indonesia: Dari Ideologi Menuju Realitas,"* dalam *Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia*, ed. Gavin W. Jones dan R. M. Douglas (Singapura: Oxford University Press, 1991), hlm. 123–145.

[8] Peter F. Bell, *The Political Economy of the Indonesian Transmigration Program* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1987), hlm. 91.

[9] Monica O. Lindberg, "Integrasi dan Konflik Permukiman Transmigrasi: Studi Kasus dari Lampung," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 155, no. 3 (1999): hlm. 407–432.

[10] Ashfahrizal, *Sejarah Perkebunan Kelapa Sawit Ophir dari Onderneming hingga* (Skripsi, Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang, 1996), hlm. 3

Kabupaten Pasaman Barat, khususnya Kecamatan Ranah Batahan, merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini. Secara historis, wilayah ini merupakan bagian dari *rantau* Minangkabau kawasan pinggiran di luar wilayah adat inti *darek* yang sejak lama menjadi ruang pertemuan berbagai kelompok etnis pendatang.[11] Konsep rantau dalam masyarakat Minangkabau sendiri secara historis erat kaitannya dengan pola migrasi dan pembentukan permukiman baru di luar wilayah nagari asal, yang pada gilirannya turut membentuk pola kepemimpinan dan kelembagaan adat yang beradaptasi dengan konteks setempat.[12] Ranah Batahan, khususnya Nagari Desa Baru, menjadi lokasi yang kaya untuk mengkaji dinamika kepemimpinan lokal dalam masyarakat multietnis karena mempertemukan tiga kelompok etnis dengan latar belakang adat dan sistem sosial yang berbeda, Minangkabau sebagai penduduk asli dengan sistem adat nagari, Mandailing yang berasal dari wilayah Tapanuli bagian selatan, serta Jawa yang datang melalui gelombang kolonisasi dan transmigrasi.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gelombang transmigran asal Pulau Jawa pertama kali tiba di Pasaman pada tahun 1951, pada masa pemerintahan Bupati Pasaman AM. Jalaluddin, disusul kemudian oleh migrasi penduduk etnis Mandailing dari Sumatera Utara melalui pelabuhan-pelabuhan di Natal, Batahan, dan Air

[11]Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979), hlm. 14

[12]Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, terj. Gusti Asnan dan Akiko Iwata (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),hlm. 45–60.

Bangis.[13] Salah satu kawasan yang menjadi tujuan penempatan transmigran tersebut adalah kawasan yang kemudian dikenal dengan nama Nagari Desa Baru, di Kecamatan Ranah Batahan. Pada rentang tahun 1954–1956, gelombang transmigran asal Jawa secara khusus ditempatkan di kawasan Desa Baru Pasaman Barat, dan pada tahap berikutnya kawasan tersebut bahkan turut menerima kedatangan transmigran keturunan Jawa yang sebelumnya bermukim di Suriname.[14] Peristiwa ini menjadikan Nagari Desa Baru sebagai salah satu kawasan transmigrasi tertua di Sumatera Barat.[15]

Keterangan ini turut dikuatkan oleh sumber independen di luar dokumen monografi nagari: Zaiyardam Zubir, dalam karyanya Radikalisme Kaum Pinggiran, mengutip Majalah Minangkabau No. 1 Tahun ke-5 (1935) yang mencatat bahwa sejak zaman kolonial Belanda, Pasaman Barat telah banyak didatangi transmigran, dan secara spesifik menyebut tahun 1935 sebagai tahun ketika orang Jawa telah sampai di Desa Baru untuk membuka hutan sebagai lahan pertanian.[16] Kesesuaian antara sumber arsip termuan ini dengan kesaksian lisan sejumlah informan generasi pertama transmigran

UIN IMAM BONJOL PADANG

[13]Undri, "Migrasi dan Interaksi antara Etnis di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 4, no. 2 (2018): hlm. 1189–1210.

[14]Eni May, "*Potret 3 Desa Transmigrasi Orang Jawa: Studi Kasus di Desa Tongar, Koja dan Desa Baru Pasaman Sumatera Barat*" (Laporan Penelitian, Fakultas Sastra, Universitas Andalas, Padang, 2006), hlm. 4.

[15]"Desa Baru, Ranah Batahan, Pasaman Barat," dalam *Wikipedia Bahasa Indonesia*, diakses 6 Agustus 2026.

[16]Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan* (Yogyakarta: Insist Press, 2002), hlm. 162, mengutip Majalah Minangkabau No. 1 Tahun ke-5 (1935), yang mencatat bahwa sejak zaman kolonial Belanda, Pasaman Barat telah banyak didatangi transmigran, dan pada tahun 1935 orang Jawa telah sampai di Desa Baru, sebuah wilayah kolonisasi di Pasaman, untuk membuka hutan sebagai lahan pertanian.

yang menyebut tahun 1935 sebagai tahun kedatangan mereka memperkuat keabsahan periodisasi awal penelitian ini.

Kekhasan yang menjadikan Nagari Desa Baru menarik untuk dikaji secara historis terletak pada keberagaman etnisnya. Berbeda dari kebanyakan wilayah Nagari lain di Sumatera Barat yang penduduknya didominasi oleh etnis Minangkabau dengan struktur kepemimpinan adat yang mapan, di Nagari Desa Baru justru etnis Jawa tumbuh menjadi kelompok mayoritas, melampaui jumlah penduduk etnis Mandailing dan Minangkabau yang juga bermukim di kawasan tersebut. Struktur demografis semacam ini kemudian berimplikasi langsung pada pola kepemimpinan lokal: jabatan-jabatan kepemimpinan strategis di nagari, termasuk kedudukan sebagai Wali Nagari, sejak awal telah dipegang oleh tokoh-tokoh dari kalangan etnis Jawa.[17]

Kondisi ini menjadi lebih menarik apabila dikaitkan dengan struktur adat Minangkabau, yang secara tradisional menempatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Keanggotaan KAN tidak hanya terdiri atas para penghulu atau datuak sebagai representasi niniak mamak, tetapi juga mencakup unsur alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan parik paga sesuai dengan adat salingka nagari. Para penghulu tersebut yang kedudukannya diperoleh melalui hubungan genealogis dalam sistem

UIN IMAM BONJOL PADANG

[17]*Profil Nagari Desa Baru*, bagian "Legenda dan Sejarah Nagari." 2015-2020

kekerabatan matrilineal Minangkabau.[18] Namun, penelitian pendahuluan yang penulis lakukan di lapangan menunjukkan bahwa kedudukan Ketua KAN di Nagari Desa Baru pun turut dipegang oleh tokoh dari kalangan etnis Jawa suatu kondisi yang menyimpang dari pola umum kepemimpinan adat nagari di Minangkabau, yang idealnya diisi oleh penghulu bersuku asli. Fenomena ini menandakan adanya dinamika kepemimpinan lokal yang unik, di mana struktur formal kenagarian yang berasal dari sistem adat Minangkabau justru diisi dan dijalankan oleh kelompok etnis pendatang.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah relasi antara kelompok transmigran dengan tanah ulayat, yang pada umumnya menjadi salah satu sumber konflik utama di banyak kawasan transmigrasi di Sumatera Barat. Menariknya, di Nagari Desa Baru tidak pernah tercatat adanya konflik tanah ulayat. Hal ini disebabkan tanah yang dijadikan kawasan permukiman transmigrasi telah lebih dahulu diserahkan oleh penghulu setempat pada masa kolonial, berdasarkan suatu perundingan yang menjadikan kawasan tersebut sebagai wilayah kolonisasi.[19] Dengan demikian, status tanah ulayat di Nagari Desa Baru secara praktis telah beralih fungsi sejak awal pembukaan kawasan, sehingga ketiadaan konflik

UIN IMAM BONJOL PADANG

[18]Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau* (Yogyakarta: Ombak, 2008), hlm. 12–20, mengenai kedudukan ninik mamak/penghulu dalam struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN).

[19]Eni May, "*Potret 3 Desa Transmigrasi Orang Jawa,*" hlm. 6, mengutip Bulletin Kolonisatie 1941 tentang pembukaan permukiman kolonisasi di Nagari Batahan berdasarkan perundingan dengan penghulu setempat.

agraria ini turut membentuk pola relasi sosial dan politik yang khas antara penduduk pendatang dan penduduk asli di kawasan tersebut.

Dinamika kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan sistem pemerintahan lokal yang terjadi secara nasional. Sejak awal masa Orde Baru (1966), berlangsung proses resentralisasi bertahap terhadap sistem pemerintahan daerah, yang puncaknya terwujud tiga belas tahun kemudian melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa penetapan hukum yang menyeragamkan seluruh satuan pemerintahan terendah di Indonesia menjadi sistem desa, dengan tujuan utama memudahkan kontrol politik dari pemerintah pusat, meski harus mengorbankan otonomi kelembagaan adat lokal seperti nagari di Sumatera Barat, tempat jorong berubah nomenklatur menjadi dusun dan mengakibatkan peran tokoh adat mengalami pemarjinalan struktural.[20] Kebijakan ini baru terkoreksi setelah bergulirnya Reformasi, ditandai terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang membuka kembali ruang otonomi daerah, yang di Sumatera Barat segera direspons melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 yang dikenal luas dengan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[20]Irhash A. Shamad, *Hegemoni Politik Pusat dan Kemandirian Etnik di Daerah: Kepemimpinan Sumatera Barat di Masa Orde Baru* (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 2001), Bagian 3, yang menjelaskan bahwa resentralisasi pemerintahan daerah pada masa Orde Baru berlangsung bertahap sejak 1966 dan berpuncak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menyeragamkan seluruh satuan pemerintahan terendah di Indonesia demi kemudahan kontrol politik dari pusat, mengorbankan otonomi kelembagaan adat lokal seperti nagari di Sumatera Barat.

semboyan *"Baliak ka Nagari"* (Kembali ke Nagari).[21] Perubahan sistem dari nagari menjadi desa dan kembali menjadi nagari ini secara garis besar berlangsung dalam tiga babak besar sejarah politik nasional Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi yang menjadi konteks penting untuk memahami bagaimana kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru bertahan, beradaptasi, atau mengalami perubahan corak, termasuk kemungkinan munculnya resistensi terhadap perubahan tersebut, pada setiap fase pemerintahan.

Penulis memilih tahun 1954 sebagai batas awal kajian karena pada tahun tersebut gelombang transmigrasi etnis Jawa mulai ditempatkan secara intensif di Nagari Desa Baru sejalan pula dengan rujukan Eni May yang mencatat penempatan transmigran Jawa berlangsung pada rentang 1954–1956 sebagai kelanjutan dari kebijakan kolonisasi yang telah dirintis sejak masa kolonial Belanda. Adapun batas akhir kajian ditetapkan pada tahun 2000, tahun ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 merupakan penutup fase historis kepemimpinan lokal berbasis sistem desa, sebelum Nagari Desa Baru memasuki babak baru dalam era otonomi nagari.

Berdasarkan uraian di atas, kajian mengenai dinamika kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru menjadi penting untuk dilakukan, bukan semata-mata untuk merekonstruksi rangkaian peristiwa

UIN IMAM BONJOL PADANG

[21]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Perda "Baliak ka Nagari"), ditetapkan 16 Desember 2000.

kepemimpinan di kawasan tersebut, tetapi juga untuk memahami bagaimana suatu kelompok etnis pendatang dapat memperoleh dan mempertahankan posisi kepemimpinan lokal baik pada ranah pemerintahan formal maupun pada ranah kelembagaan adat dalam kurun waktu yang panjang, sejauh mana proses tersebut memicu resistensi di tengah masyarakat, serta bagaimana dinamika tersebut turut membentuk struktur sosial dan pola hubungan antaretnik di tengah masyarakat yang multietnis.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat dirumuskan dalam persoalan pokok yaitu, bagaimana *Dinamika Kepemimpinan lokal di daerah Transmigrasi nagari Desa Baru, Pasaman Barat (1954-2000)*, timbul dua pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana dinamika kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat tahun 1954–2000?
2. Bagaimana dampak dinamika kepemimpinan lokal tersebut terhadap struktur sosial masyarakat dan hubungan antaretnik di Nagari Desa Baru tahun 1954–2000?

UIN IMAM BONJOL PADANG

Adapun agar penelitian ini terarah dan tidak mengembang kepada pembahasan lain sesuai dengan judul penelitian yang penulis tulis tentang *Dinamika Kepemimpinan Lokal di daerah Transmigrasi nagari Desa Baru Pasaman Barat (1954-2000)*, maka penulis memberikan batasan tematis

yang berfokus pada tema sosial politik. Sedangkan, Melihat ruang lingkup yang cukup luas peneliti membatasi fokus penelitian pada batasan temporal, dalam penelitian ini merujuk pada rentang waktu antara tahun 1954 hingga 2000. Tahun 1954 dipilih sebagai batas awal karena merupakan periode awal masuknya program transmigrasi ke Nagari Desa Baru yang menjadi titik mula terbentuknya masyarakat multietnis serta pola kepemimpinan lokal di wilayah ini, sebagai kelanjutan dari kebijakan kolonisasi yang telah dirintis sejak masa kolonial Belanda. Adapun tahun 2000 dipilih sebagai batas akhir karena menandai berakhirnya fase pemerintahan sistem desa dan dikukuhkannya kembali sistem pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, sehingga menjadi penutup yang tepat bagi satu babak sejarah kepemimpinan lokal sebelum memasuki era otonomi nagari yang baru.

Batasan spasial merupakan batasan wilayah yang ditetapkan dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian ini dibatasi pada wilayah Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai salah satu nagari yang terbentuk dari proses transmigrasi dengan komposisi penduduk multietnis, meliputi etnis Jawa, Mandailing, dan Minangkabau.

UIN IMAM BONJOL PADANG

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Dilihat dari latar belakang dan juga rumusan Masalah terkait Dinamika Kepemimpinan Lokal di daerah Transmigrasi Desa Baru Pasaman Barat, maka yang menjadi tujuan penelitian ialah;

1. Mendeskripsikan dan menganalisis dinamika kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat tahun 1954–2000, mencakup proses terbentuknya kepemimpinan pada masa awal transmigrasi, pergantian kepemimpinan pada setiap fase sistem pemerintahan, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta ada tidaknya resistensi terhadap dominasi kepemimpinan etnis pendatang.
2. Menganalisis dampak dinamika kepemimpinan lokal tersebut terhadap struktur sosial masyarakat dan hubungan antaretnik di Nagari Desa Baru tahun 1954–2000, khususnya dalam kaitannya dengan relasi antara etnis Jawa, Mandailing, dan Minangkabau serta status penguasaan tanah ulayat di wilayah tersebut.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua katagori, yaitu kegunaan secara akademis dan praktis. Kegunaan secara akademis tentunya dapat memperkaya khazanah historiografi lokal mengenai kepemimpinan di daerah transmigrasi, sekaligus memberikan gambaran alternatif dari pola umum yang selama ini dipahami mengenai relasi kepemimpinan adat dan etnisitas di Sumatera Barat, terutama di konteks Pasaman Barat yang selama ini relatif masih terbatas dibandingkan daerah

transmigrasi lain. Dan adapun kegunaan secara praktis bermanfaat Bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan kepemimpinan yang inklusif, yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok etnis secara adil. Bagi tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, penelitian ini dapat menjadi cermin untuk melihat sejauh mana pola kepemimpinan yang ada telah mendorong keharmonisan, integrasi, dan kerja sama antaretnik atau justru memelihara potensi konflik laten. Bagi masyarakat nagari Desa Baru, penelitian ini diharapkan mampu memahami kesadaran akan pentingnya hubungan antar etnik yang saling menghargai dan mengelola perbedaan secara damai. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pijakan awal untuk penelitian lanjutan mengenai transmigrasi, konflik sosial, dan kepemimpinan lokal di wilayah lain. tentunya penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman pada penelitian selanjutnya yang mengekspolarasi tentang transmigrasi jawa di Desa Baru dalam konteks pembahasan yang berbeda. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan manambah pemahaman sehingga memperdalam literatur kepustakaan di sumatera Barat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

D. Penjelasan judul

Untuk dapat dipahami secara detail penjelasan judul Dinamika Kepemimpinan Lokal di daerah Transmigrasi Desa Baru Pasaman Barat, maka penulis merasa perlu menjelaskan bagaimana pokok yang terdapat

dalam judul diantaranya sebagai berikut: Dinamika berarti gerak atau perubahan yang terjadi secara terus-menerus dalam suatu keadaan, sehingga menimbulkan pergeseran, penyesuaian, maupun perkembangan dari waktu ke waktu. Dalam konteks penelitian ini, dinamika merujuk pada proses perubahan, pergantian, dan penyesuaian yang terjadi dalam kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru sepanjang tahun 1954–2000, baik yang disebabkan oleh faktor internal masyarakat maupun oleh perubahan kebijakan pemerintahan dari luar.

Kepemimpinan lokal adalah kedudukan dan peran seseorang atau sekelompok tokoh dalam memimpin, mengatur, dan mengambil keputusan bagi kepentingan masyarakat di suatu wilayah tertentu, baik dalam kapasitas formal (seperti wali nagari atau kepala desa) maupun kapasitas adat (seperti pemangku Kerapatan Adat Nagari/KAN). Dalam penelitian ini, kepemimpinan lokal yang dimaksud mencakup kepemimpinan formal administratif maupun kepemimpinan adat yang berlaku di Nagari Desa Baru.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Daerah transmigrasi adalah wilayah yang menjadi lokasi penempatan penduduk yang dipindahkan dari daerah asal yang padat penduduk ke daerah baru yang masih jarang penduduknya, melalui program transmigrasi yang dijalankan pemerintah, baik pada masa kolonial (dikenal dengan istilah kolonisasi) maupun pada masa pascakemerdekaan. Menurut Joan Hardjono, pengertian transmigrasi merujuk pada program-program pemerintah yang dilaksanakan dalam

rangka pemecahan masalah kepadatan penduduk, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah (pulau) yang berpenduduk padat ke daerah (pulau) lain yang berpenduduk jarang. Sedangkan menurut kamus besar bahasa inggris tidak ada istilah khusus transmigrasi, yang ada migrasi (migration) yang atinya perpindahan sesorang dari suatu negara untuk menetap. Dalam penelitian ini, daerah transmigrasi yang dimaksud adalah Nagari Desa Baru, yang dibuka sebagai kawasan penempatan transmigran asal Jawa.

Desa Baru merupakan sebuah Nagari yang berada di kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang terbentuk dari proses transmigrasi dan dihuni oleh masyarakat multietnis, yaitu etnis Jawa, Mandailing, dan Minangkabau. Nagari Desa Baru menjadi objek utama (locus) dalam penelitian ini. Nagari Desa Baru memiliki empat jorong yaitu; Jorong Dadimulyo, Mulyorejo Timur, Mulyorejo Barat, Sepakat Madani, Sidomulyo.

Kecamatan Ranah Batahan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Mandailing Natal, dan menjadi wilayah administratif tempat Nagari Desa Baru berada. Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi cakupan wilayah administratif dari lokasi penelitian ini.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Rentang tahun 1954 hingga 2000 merupakan batasan temporal (kurun waktu) penelitian ini. Tahun 1954 dipilih sebagai batas awal karena merupakan periode dibukanya Nagari Desa Baru sebagai kawasan transmigrasi yang menjadi titik mula terbentuknya pola kepemimpinan lokal di wilayah ini. Tahun 2000 dipilih sebagai batas akhir karena menandai berakhirnya fase pemerintahan sistem desa dan dikukuhkannya kembali sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000.

Berdasarkan dari penjelasan dari istilah-istilah di atas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini secara keseluruhan merupakan suatu kajian sejarah mengenai proses perubahan dan perkembangan kepemimpinan lokal, baik formal maupun adat, yang terjadi di Nagari Desa Baru, sebuah nagari yang terbentuk dari daerah transmigrasi di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, sepanjang tahun 1954 hingga 2000, beserta dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat dan hubungan antaretnik di wilayah tersebut.

UIN IMAM BONJOL PADANG

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai Kepemimpinan Lokal dan transmigrasi di Kabupaten Pasaman Barat bukanlah merupakan topik yang sama sekali baru. Peneliti sebelumnya telah menyinggung permasalahan ini dalam menyangkut sudut pandang yang berbeda tentunya, Eni May, dalam laporan penelitiannya berjudul Potret 3 Desa Transmigrasi Orang Jawa, mengupas kondisi umum masyarakat transmigran di tiga desa di

Kabupaten Pasaman, termasuk Desa Baru, dengan fokus pada aspek sosial-ekonomi dan sejarah pembukaan kawasan kolonisasi.[22] Sementara itu, Nelly Indrayani dan Supian Ramli mengangkat persoalan transmigrasi dari sudut pandang keagamaan dalam kajian Transmigrasi dan Kristenisasi di Pasaman.[23]

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Elsa Mawaddah dan Suriani yang berjudul Kehidupan sosial transmigrasi Jawa di pemukiman baru II kenegarian parit kabupaten Pasaman Barat tahun 1993-1994, dalam jurnal transformasi pendidikan dan pembelajaran yang mengkaji tentang masuknya transmigran Jawa ke Pemukiman Baru II tahun 1993. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kehidupan masyarakat transmigran Jawa dengan penduduk lokal di Pemukiman Baru II Pasaman Barat tahun 1993-1994. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah yaitu tahap heuristik, yang mencakup pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmigran Jawa yang datang ke Pemukiman Baru II adalah orang-orang yang berasal dari 3 Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dari Kabupaten yang berbeda.[24]

UIN IMAM BONJOL PADANG

---

[22] Eni May, "*Potret 3 Desa Transmigrasi Orang Jawa: Studi Kasus di Desa Tongar, Koja dan Desa Baru Pasaman Sumatera Barat*" (Laporan Penelitian, Universitas Andalas, Padang, 2006), hlm. 2.

[23]Nelly Indrayani dan Supian Ramli, "Transmigrasi dan Kristenisasi di Pasaman," *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. XII (2023), hlm. 94.

[24] Elsa Mawaddah dan Suriani, Kehidupan sosial transmigrasi Jawa di pemukiman baru II kenegarian parit kabupaten Pasaman Barat tahun 1993-1994. *Jurnal transformasi pendidikan dan pembelajaran,* Vol. 9, No.4, (November 2025), hlm 40

Adapun yang menjadi alasan para transmigran Jawa mangikuti program transmigrasi karena ingin merubah keadaan ekonomi dan kehidupan mereka dari yang sebelumnya di Pulau Jawa. Selain itu pada awal kedatangan mereka mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan baru dengan penduduk lokal.

Penelitian sebelumnya ditulis oleh Dzaki Setiabasith, dengan judul Pola Migrasi Intergenerasi Transmigran Jawa di Lampung: Analisis Karakteristik dan Perkembangan Kehidupan, dalam journal of indonesian rural and regional goverment yang mengkaji tentang menganalisis pola migrasi yang terbentuk secara intergenerasi transmigran Jawa di Lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam terhadap 16 informan dari transmigran generasi kedua hingga keempat. Hasil penelitian menunjukkan pola migrasi yang terbentuk secara intergenerasi memiliki kecenderungan "kembali ke Jawa". Pola ini dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesempatan kerja di Lampung, serta faktor penarik berupa kualitas pendidikan dan peluang ekonomi yang lebih baik di Jawa. Perkembangan sosial dan ekonomi secara intergenerasi membuat dorongan terhadap migrasi semakin tinggi, didukung dengan karakteristik daerah tujuan yang lebih menjanjikan.[25] Penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah dalam program transmigrasi agar

UIN IMAM BONJOL PADANG

[25] Dzaki Setiabasith, Pola Migrasi Intergenerasi Transmigran Jawa di Lampung: Analisis Karakteristik dan Perkembangan Kehidupan. *Journal of indonesian rural and regional goverment*, Vol. 9, No. 2, (2025), hlm 5-7 ISSN Online: 2829-0798 . ISSN Cetak: 2580-9342

dapat memaksimalkan potensi transmigrasi wilayah yang berkelanjutan hingga intergenerasi.

Sara Kurniasari dalam skripsinya yang berjudul adaptasi mayarakat transmigrasi jawa terhadap kebudayaan jambi di desa wanareja rimbo ulu tebo 1978-1990 membahas bagaimana awal mula transmigrasi di Desa Wanareja Rimbo Ulu Tebo Jambi 1978-1990, bagaimana upaya masyarakat transmigrasi Jawa berdaptasi terhadap kebudayaan Jambi di Desa Wanareja Rimbo Ulu Tebo Jambi 1978-1990, dan bagaimana kontribusi masyarakat transmigrasi Jawa terhadap kebudayaan Jambi di Desa Wanareja Rimbo Ulu Tebo Jambi 1978-1990 dengan menggunakan metode penelitian Historis yang diawali dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama awal mula transmigrasi di Desa Wanareja yang disebabkan oleh faktor pemerintah dan faktor kondisi masyarakat, Kedua terdapat proses upaya beradaptasi terhadap kebudayaan Jambi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan melakukan empat tahapan yaitu Komunikasi, Pencapaian Tujuan (Goal Attaimenment), Integrasi dan Lesensi,[26] Ketiga hasil kontribusi masyarakat transmigrais Jawa terhadap kebudayaan Jambi berupa alkulturasi kebudayaan antara kebudayaan Jawa dengan kebudayaan Jambi yaitu penggunaan irama Melayu pada pembacaan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[26] Sara Kurniasari, Adaptasi mayarakat transmigrasi jawa terhadap kebudayaan jambi di desa wanareja rimbo ulu tebo 1978-1990. *Skripsi*, universitas Jambi, 2024, hlm. 6

Berzanji, penambahan kosa kata Gori dan penamaan Desa Wanareja yang merupakan kata dari bahasa Jawa.

Penelitian yang ditulis oleh Susetyo dkk, dengan judulnya "Kebijakan Transmigrasi dalam Kerangka Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung, dalam Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, yang mengkaji tentang meratakan pembangunan dan mengurangi kepadatan penduduk di pulau-pulau padat seperti Jawa. Tujuan penelitian adalah menggambarkan perkembangan program transmigrasi sejak era kolonial hingga kontemporer, serta mengidentifikasi capaian dan tantangan dalam integrasi sosial, dampak lingkungan, dan pengembangan infrastruktur di wilayah transmigrasi. Metode yang digunakan adalah sosio-legal yang memfokuskan pengkajian terhadap suatu permasalahan pada pelaksanaan hukum yang ada di keseharian masyarakat. Data dikumpulkan melalui studi lapangan di Provinsi Lampung pada tahun 2024.[27] Temuan dari penelitian ini adalah transmigrasi di Provinsi Lampung telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak dimulainya program tersebut. Bahkan, provinsi Lampung sudah mulai bergeser dari provinsi penerima transmigrasi menjadi pengirim transmigrasi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mailiza Hidayati, dalam skripsinya yang diterbitkan Universitas Sriwijaya yang berjudul

UIN IMAM BONJOL PADANG

[27]Susetyo dkk,"Kebijakan Transmigrasi dalam Kerangka Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 25: No. 2, Article 1. DOI: https://doi.org/ 10.7454 / jurna lkessos.v25i2.1034 Available at

"Kehidupan masyarakat transmigran suku jawa di desa surya adi kecamatan mesuji kabupaten ogan komering ilir tahun 1975-2005". Peneliti mengkaji rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat Transmigran suku Jawa di Desa Surya Adi Tahun 1975-2005 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Transmigran Suku Jawa di Desa Surya Adi. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan Perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat Transmigran Suku Jawa di Desa Surya Adi tahun 1975-2005. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Pembukaan Desa Surya Adi dilakukan oleh Masyarakat Transmigran Suku Jawa pada tahun 1975 melalui transmigrasi lokal.[28] Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedangkan persamaannya mengkaji masalah transmigrasi.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Nyata Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul peran transmigrasi etnis jawa dalam mengembangkan pendidikan di desa kotaraya kecamatan mepanga kabupaten parigi mautong" Penelitian ini membahas tiga Permasalahan yaitu Bagaimana Proses Kedatangan Transmigran Etnis Jawa di Desa Kotaraya, Bagaimana peran Orang Jawa dalam mengembangkan Pendidikan di Desa Kotaraya, Mengapa Orang Jawa

[28] Mailiza Hidayati ,Kehidupan masyarakat transmigran suku jawa di desa surya adi kecamatan mesuji kabupaten ogan komering ilir tahun 1975-2005. *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, 2022, hlm. 5

menyukai bekerja dibidang Pendidikan di Desa Kotaraya. Penelitian ini bertujuan Menjelaskan Asal-usul, Proses, hingga penempatan obyek Transmigrasi Kotaraya, Mendeskripsikan peran Transmigran Etnis Jawa dalam mengembangkan Pendidikan di Desa Kotaraya, Menganalisis pekerja Orang Jawa di Kotaraya dan hubungan dengan pendidikan di Kotaraya. Pertanyaan penelitian ini menggunakan metodologi sejarah. Analisis hasil penelitian menunjukan bahwa Proses kedatangan Transmigran di Desa Kotaraya yaitu dengan mendaftar ke petugas transmigrasi dan di kantor transmigrasi untuk didaftar sebagai warga yang mengikuti program transmigrasi.[29] Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan di desa kotaraya kecamatan mepanga kabupaten parigi mautong. Sedangkan persamaannya mengkaji masalah transmigrasi.

Perubahan pola kehidupan masyarakat transmigran jawa di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo 1976-2018" yang di tulis oleh Nelly Indrayani dan Ahmad Khoirul Na'im dalam jejak : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi yang mengkaji tentang Transmigrasi bertujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Jawa telah dimulai sejak masa Kolonial. Metode yang digunakan dalam kajian ini yakni metode historis, dimulai dari heuristik, kritik sumber, intepretasi dan historiografi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa

UIN IMAM BONJOL PADANG

[29] Nyata Wahyuni, peran transmigrasi etnis jawa dalam mengembangkan pendidikan di desa kotaraya kecamatan mepanga kabupaten parigi mautong. *Skripsi*, Universitas Tadulako, 2021, hlm. 1

transmigrasi masyarakat Jawa di desa Pulung Rejo bermula dari pembangunan waduk gajah mungkur tahun 1976. Hal ini berdampak pengadaaan transmigrasi pemerintah Bedol Desa. Dinamika pola kehidupan masyarakat terlihat kemampuan produktivitas dan kemandirian masyarakat, tidak hanya bagi masyarakat transmigrasi Jawa tetapi juga masyarakat lokal Desa Pulung Rejo. Hal ini memperlihatkan integritas dan sinergitas wilayah pemukiman transmigrasi Pulung Rejo, sehingga sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan tumbuh dan berkembang.[30] Penelitian ini menekankan tentang tujuan dari transmigrasi dalam menigkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Ketegangan Sosial di Lampung Akibat Program Transmigrasi Di Era 1950an yang ditulis oleh Aan Budianto dalam Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah yang membahas tentang ketegangan sosial di Lampung pada tahun 1950an. Tujuan penelitian ini guna mencari jawaban mengenai permasalahan gejolak sosial di Lampung tersebut, dilakukan kajian sejarah kritis dengan mengumpulkan berbagai macam sumber seperti arsip-arsip berbentuk koran, foto, jurnal dan laporan pemerintah. Hasil analisis dari sumber-sumber mengenai kajian ini dapat disimpulkan bahwa faktor utama munculnya gejolak sosial penolakan program transmigrasi di Lampung adalah semakin padatnya wilayah Lampung yang membuat ruang gerak penduduka asli suku Lampung

UIN IMAM BONJOL PADANG

[30] Nelly Indrayani dan Ahmad Khoirul Na'im, "Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat Transmigran Jawa di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo 1976–2015," *Jejak: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah,* Vol. 1, no. 2 (Desember 2021): hlm 43–51.

terdesak. Hal ini diperparah oleh kebijakan dari pemerintah yang terlalu memprioritaskan para pendatang. Pendatang dianggap kurang mampu dan butuh bantuan adaptasi sehingga pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan pendatang, dan bahkan merampas hak-hak masyarakat adat. Salah satu kebijakan yang dianggap tidak adil adalah penggunaan tanah adat sebagai daerah penempatan trasnmigran yang melewati batas.[31]

Penelitian yang juga dilakukan oleh Yudhi Zuriah Wirya Purba dan Wardi Saleh yang berjudul Transmigrasi Sebagai Upaya Pertanian di dalam Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI), dengan tema transmigrasi sebagai upaya pertanian dan pengembangan wilayah, dengan fokus pada reorientasi program transmigrasi di era desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan untuk Membahas pelaksanaan program transmigrasi untuk pemerataan pengembangan, tantangan sentralistik vs. desentralisasi, integrasi kawasan transmigrasi dengan wilayah sekitar (fisik-spasial, sosial, ekonomi, budaya), pengembangan konsep baru dengan indikator komprehensif (fisik, ekonomi, modal sosial, lingkungan), serta mengatasi stigma negatif yang memicu pengembangan di luar Pulau Jawa. Tujuan utama adalah reorientasi transmigrasi agar terintegrasi secara fungsional dan berkelanjutan. Hasil Pemilihan konsep dan strategi baru pengembangan kawasan transmigrasi dengan indikator

UIN IMAM BONJOL PADANG

[31] Aan Budianto, "Ketegangan Sosial di Lampung Akibat Program Transmigrasi di Era 1950," *Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah,* Vol. 20, no. 1 (Maret 2020): hlm. 18.

komprehensif. Diidentifikasi tiga kendala utama: struktural (lemah organisasi dan sinkronisasi), substansial (anggaran terbatas meski mendukung pembangunan nasional), serta teknis operasional (pemilihan lokasi kurang tepat, kurangnya integrasi antar-sektor).[32]

F. Metode penelitian

Dalam melakukan Penelitian ini penulis mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan judul skripsi yang di ambil. Metode yang digunakan penulis ialah metode penelitian sejarah, Metode ini merupakan langkah yang digunakan oleh sejarawan dalam memahami peristiwa yang terjadi di masa lalu. Menurut webster metode merupakan cara atau prosedur yang bersifat sistematis, sementara itu Penelitian sejarah adalah penelitian yang mempelajari tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau manusia. Tujuannya ialah untuk merekonstruksi kembali peristiwa masa lampau secara sistematis dan obyektif. Tujuan ini bisa dicapai dengan menggunakan metode sejarah.[33] Selanjutnya menurut Gilbert J. Garraghan metode sejarah diartikan sebagai "seperangkat prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk membantu dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis (umumnya

UIN IMAM BONJOL PADANG

[32] Yudhi Zuriah Wirya Purba dan Wardi Saleh yang berjudul Transmigrasi Sebagai Upaya Pertanian di dalam *Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI),* Volume. 1, Nomor. 1, (Edisi Februari 2023), hlm 71 P.ISSN. 0000.0000, E-ISSN. 0000.0000

[33] Nina Herlina, *Metode Sejarah,* Satya Historika: Bandung, Juli 2020. hlm 1, ISBN 978-602-7859-14-2

dalam bentuk tertulis) hasil yang dicapai".[34] Sementara itu, menurut Louis Gottschalk yang dimaksud dengan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif tentang masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi (penulisan sejarah). Dengan menggunakan metode sejarah dan historiografi (yang sering dipersatukan dengan nama metode sejarah) sejarawan berusaha untuk merekonstruksi masa lampau manusia.[35] Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

1. Heuristik

   Heuristik merupakan suatu pendekatan atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan sumber atau data sejarah. Heuristik berasal dari bahasa Yunani *"heuriskein,"* yang berarti "menemukan". Heuristik dapat diartikan sebagai tahap pencarian, penemuan, dan pengumpulan sumber-sumber dengan berbagai cara dan dalam berbagai bentuk untuk memahami peristiwa atau kejadian sejarah yang relevan.[36] Sementara Menurut Notosusanto dkk., heuristik diartikan sebagai aktivitas eksplorasi sumber, pencarian, serta pengumpulan bahan yang akan diteliti, baik berupa

UIN IMAM BONJOL PADANG

[34] Vanni Octavania, *Jerman di Bawah Pemerintahan Adolf Hitler (Kajian Historis Tentang Gerakan Oposisi Terhadap Pemerintahan Adolf Hitler pada Tahun 1933-1945). Skripsi* S-1, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2015, Bab III: Metode Penelitian, hlm. 50

[35]Een Herdiani, Metode sejarah dalam penelitian tari, *Jurnal Ilmiah Seni Makalangan*,Vol.3, No. 2, 2016, hlm 35

[36] Laksono, Anton Dwi. *Apa Itu: Sejarah, Pengertian, Ruang Lingkup, Metode, dan Penelitian.* Drewati Press, 2018 hlm 94 ISBN 978-602-5705-05-2. E-ISBN 978-623-706-525-X.

objek fisik maupun sumber yang diperoleh dari lokasi penelitian dan sumber lisan.[37] Menurut G.J Renier Heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum.[38] Heuristik juga dikatakan sebagai proses keterampilan dalam menemukan sumber dan menjadi tahapan awal dalam metode penelitian sejarah.

Dalam melakukan proses penelusuran sumber data untuk penelitian ini, peneliti melakukan Studi kepustakaan *(library research)* serta penelitian di lapangan *(field research).* Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dari literatur, seperti buku, artikel, dan dokumen lainnya. Sebaliknya, penelitian di lapangan melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau populasi yang diteliti.[39] Metode ini menggunakan teknik wawancara langsung untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diakses melalui sumber tertulis. Diharapkan dapat diperoleh sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer merujuk pada informasi yang berasal langsung dari para pelaku sejarah atau saksi mata.[40] Dalam penelitian ini, sumber primer terdiri dari sumber lisan dan sumber tertulis. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara

UIN IMAM BONJOL PADANG

[37] Louis. *Mengerti Sejarah*. *Terjemahan Nugroho Notosusanto.* Jakarta: UI Press, 1986. hlm. 18.

[38] Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam,* (Ombak, Yogyakarta, 2011) hlm 104

[39] Sayono Joko, *Langkah-Langkah Heuristik Dalam Konteks Metode Sejarah Di Era Digital*, Sejarah dan Budaya, (2021), hlm. 371.

[40] Nanda, Salsabila. 5 Tahapan Penelitian Sejarah Menurut Ahli dan Contohnya. *Ruangguru*, 10 Okt. 2024.

dengan individu yang terlibat atau menyaksikan peristiwa tersebut, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, mantan kepala Desa maupun Wali Nagari yang menjabat, serta Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Desa Baru. Wawancara sejarah lisan digunakan untuk melengkapi kekosongan sumber tertulis, khususnya terkait proses awal pembukaan kawasan transmigrasi dan pergantian kepemimpinan lokal yang tidak seluruhnya terdokumentasi secara tertulis.[41]

Dalam penelitian ini dapat dengan menggunakan pendekatan teori positivisme Auguste Comte dalam menganalisis dinamika perubahan masyarakat melalui wawancara mendalam. Sebagaimana interaksi individu-kelompok di tengah transformasi lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan rekonstruksi perubahan sosial yang sistematis, menghubungkan observasi empiris dan wawancara dengan hukum perkembangan sosial Comte.[42] Sementara sumber tertulis yaitu semua keterangan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat fakta sejarah secara jelas, sumber ini dapat ditemukan dibatu, kayu, kertas (dokumen) dan dinding gua, dalam penelitian skripsi ini penulis mendapat sumber tertulis berupa buku profil nagari yang memuat lengkap baik dari sejarah dan juga struktur kepemimpinan dari nagari

UIN IMAM BONJOL PADANG

[41]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 74–75, mengenai penggunaan sumber lisan dan wawancara sebagai pelengkap sumber tertulis dalam penelitian sejarah lokal.

[42] Auguste Comte, *Cours de Philosophie Positive* (1830-1842), seperti dirujuk dalam Bahrein T. Sugihen, Sosiologi *Pedesaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 51

desa baru mulai dari fase nagari berubah ke desa hingga kembali ke nagari lagi. Sementara itu, Sumber sekunder adalah informasi yang disampaikan oleh pihak yang bukan pelaku sejarah atau saksi mata yang mengalami peristiwa tersebut. Pengumpulan sumber sekunder dapat dilakukan melalui majalah, buku-buku, jurnal, skripsi, website dan hasil penelitian dari orang lain yang memiliki tema yang sama.[43]Adapun sumber sekunder pada penulisan skripsi ini berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan skripsi terdahulu yang relevan dengan topik kepemimpinan nagari, transmigrasi, dan hubungan antaretnik di Sumatera Barat.

2. Kritik Sumber

Setelah semua sumber terkumpul pada tahapan heuristik dimana buku-buku yang relevan dengan pembahasan dan juga temuan yang ada dilapangan, langkah selanjutnya adalah kritik sumber sebagai pengujian kritis untuk memastikan keabsahan sumber.[44] Tahap ini bertujuan untuk menilai keakuratan dan keaslian sumber sejarah melalui analisis kritik internal dan eksternal. Kritik terhadap sumber yang diperoleh sangat penting sebagai langkah dalam mengetahui kebenaran suatu sumber, agar dapat dipertanggung jawabkan. Kritik internal menilai keaslian dan eksistensi sumber dari isi, baik sumber tertulis maupun lisan untuk melihat apakah informasi

UIN IMAM BONJOL PADANG

[43] Tarjul Arifin, *Metodologi Penelitian Sejarah,* Bandung, Pustaka Setia, 2014. Hlm 95

[44] Suhartono, Pranoto, W. *Teori dan Metodologi Sejarah.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. ISBN 978-979-756-580-0. Hlm 35

didalamnya sesuai fakta sejarah serta untuk menguji kepercayaan informasi dari satu sumber.[45] Dalam mengkritik sumber data, penulis membandingkan sumber-sumber lisan, tertulis, benda dan visual yang telah dikumpulkan pada tahap heuristik. Untuk sumber tertulis, perbandingan dilakukan dengan karya sebelum dan sesudahnya, sementara data lisan divalidasi melalui wawancara masyarakat transmigran, ketua KAN, Mantan kepala Desa, serta mendukungnya dengan saksi terkait. Setelah itu, isi dari sumber tertulis dan lisan dibandingkan.

Kritik internal menyelidiki keaslian fisik sumber terkait masyarakat transmigrasi di Desa Baru. Sumber yang digunakan meliputi buku, serta jurnal dan artikel. Untuk memastikan sumber yang digunakan otentik dan bukan hasil rekayasa. Kritik external juga menguji informasi berdasarkan usia dan posisi narasumber dalam peristiwa tersebut.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3. Sintesis

Tahap selanjutnya adalah interprestasi atau yang dikenal dengan nama sintesis, maksud dari keduanya sama yaitu proses dimana fakta-fakta yang telah didapat setelah melakukan kritik sumber disusun berdasarkan keterkaita-n sumber satu sama lain secara logis, sehingga membentuk kerangka sejarah.[46] Tentunya mengaitkan

[45] *Ibid,* 2018 Hlm. 106

[46] Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 101-102.

fakta-fakta yang telah diperoleh dengan informasi lainnya, menggunakan analisis interaktif.[47] Analisis interaktif diterapkan setelah data terkumpul untuk membandingkan dan menentukan data mana yang akan digunakan serta mana yang tidak relevan. Setelah melalui proses analisis tersebut, tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan.

4. Historiografi

Historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Historia dan grafein. Historia berarti penyelidikan tentang gejala alam fisik, sedangkan grafein berarti gambaran lukisan tulisan atau uraian. Tahapan penulisan merupakan tahap yang terakhir dalam metode penelitian; setelah ditemukan fakta-fakta penelitian kemudian fakta tersebut dituangkan dan disajikan dalam pernyataan tertulis. Penulisan ini dilakukan agar fakta yang telah didapatkan bisa dirangkai, disusun, dan disatukan dalam suatu karya ilmiah secara sistematis.

UIN IMAM BONJOL PADANG

G. Sistematika Penulisan

Skripsi berjudul Dinamika Kepemimpinan Lokal di daerah Transmigrasi Nagari Desa Baru Pasaman Barat, Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi penelitian ini, penulis menyusun skripsi ini ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut.

[47] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), hlm. 103.

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah yang menjelaskan konteks dan alasan pemilihan topik penelitian, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II MONOGRAFI NAGARI DESA BARU, PASAMAN BARAT, berisi gambaran umum wilayah penelitian, mencakup letak geografis dan sejarah terbentuknya Nagari Desa Baru, kondisi sosial dan keagamaan masyarakat, serta kondisi pendidikan, budaya, dan ekonomi masyarakat Nagari Desa Baru. Bab ini menjadi pijakan kontekstual sebelum masuk ke pembahasan inti pada bab berikutnya.

BAB III PEMBAHASAN, merupakan inti dari penelitian ini yang menjawab kedua rumusan masalah, berisi analisis mengenai dinamika kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru sejak masa awal transmigrasi hingga tahun 2000, mencakup proses terbentuknya kepemimpinan, perubahan kepemimpinan pada setiap fase sistem pemerintahan (nagari, desa, dan kembali ke nagari), ada-tidaknya resistensi terhadap dominasi etnis pendatang, serta dampak dinamika tersebut terhadap struktur sosial dan hubungan antaretnik.

BAB IV PENUTUP, berisi kesimpulan yang menjawab secara ringkas kedua rumusan masalah penelitian, serta saran yang ditujukan baik bagi pengembangan penelitian akademik selanjutnya maupun bagi masyarakat dan pemerintah Nagari Desa baru.

UIN IMAM BONJOL PADANG

BAB II
MONOGRAFI NAGARI DESA BARU KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

A. Geografis dan Sejarah Nagari Desa Baru Pasaman Barat

1. Keadaan Geografis Nagari Desa Baru

Nagari Desa Baru merupakan salah satu nagari di wilayah Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 63,98/km^2. Secara administratif, Nagari Desa Baru berbatasan dengan Nagari Batahan Tengah di sebelah utara, Nagari Air Bangis di sebelah selatan, Nagari Batahan Barat di sebelah timur, dan Nagari Desa Baru Barat di sebelah barat.[48] Wilayah nagari Desa Baru terbagi ke dalam lima wilayah kejorongan, yaitu Jorong Mulyorejo, Jorong Mulyorejo Barat, Jorong Sepakat Madani, Jorong Sidomulyo, dan Jorong Dadimulyo suatu penamaan jorong yang secara eksplisit memperlihatkan jejak budaya Jawa dalam penamaan wilayah, sebagai konsekuensi langsung dari sejarah pembukaannya sebagai kawasan kolonisasi.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 2.1 Kondisi geografis di Nagari Desa Baru

No	Uraian
1	Luas wilayah : 63,98 / km^2
2	Jumlah Jorong : 5 (Lima) Jorong

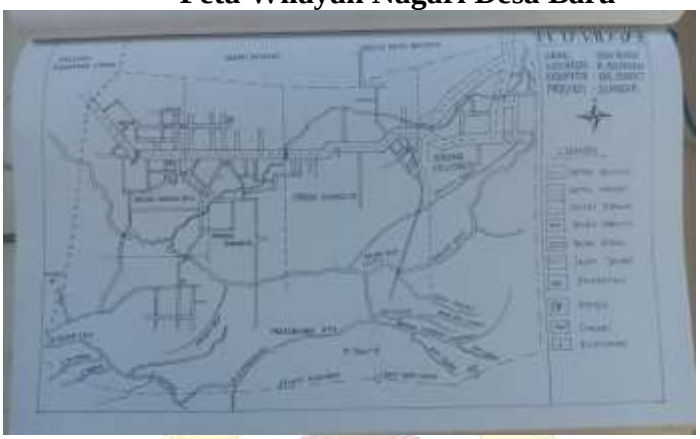
[48]Pemerintah Nagari Desa Baru, *"Profil Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat,"* dokumen monografi internal nagari, bagian "Gambaran Umum Sosial Budaya," 2015-2020.

	Jorong Mulyorejo Jorong Mulyo Rejo Barat Jorong Sepakat Madani Jorong Sidomulyo Jorong Dadimulyo
3	Batas Wilayah : Utara : Nagari Batahan Tengah Selatan : Nagari air bangis Barat : Nagari Desa Baru Barat Timur : Nagari Batahan dan Parit
4	Topografi : Dataran : 6.000 Ha Perbukitan / Pegunungan : 639 Ha
5	Tingkat Kesuburan Tanah : Sangat subur : 1.700 Ha Subur : 2. 938 Ha Sedang : 1. 300 Ha Tidak Subur : 500 Ha
6	Klimatologi : Suhu 36^0, C

Sumber : Data Wali Nagari Desa Baru

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 2.1
Peta Wilayah Nagari Desa Baru



Sumber gambar : koleksi foto Raida yani

2. Sejarah Nagari Desa Baru

Sejarah terbentuknya Nagari Desa Baru tidak dapat dilepaskan dari kebijakan kolonisasi pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Berdasarkan catatan monografi nagari, wilayah yang kemudian menjadi Nagari Desa Baru pada mulanya merupakan tanah ulayat milik ninik mamak dari tiga nagari, yaitu Nagari Air Bangis, Nagari Parit, dan Nagari Batahan. Pemerintah kolonial Belanda memberikan ganti rugi atas tanah ulayat tersebut dengan tujuan membuka kawasan permukiman pertanian dan perkebunan baru.[49] Proses penyerahan tanah ulayat ini ditempuh melalui serangkaian perundingan antara pemerintah kolonial dengan para penghulu setempat, sebagaimana tergambar dari penetapan titik-titik

[49]Pemerintah Nagari Desa Baru, *Profil* Nagari Desa Baru, bagian Legenda dan Sejarah Nagari,2020

UIN IMAM BONJOL PADANG

batas wilayah kolonisasi yang bersandar pada batas-batas alam aliran anak sungai, bukit, dan pilar-pilar batas yang disepakati secara adat.[50]

Pembukaan lahan kolonisasi secara fisik dimulai pada tahun 1937, ketika rombongan pertama penduduk asal Pulau Jawa didatangkan ke kawasan Air Bangis, disusul pembukaan lahan permukiman pada tahun 1938 yang kemudian dikenal dengan sebutan Bedeng Timur, Bedeng Tengah, dan Bedeng Barat, di bawah pimpinan seorang Asisten Wedana. Pada tahun 1940, dibentuk pula kawasan Pesanggrahan *(Medan Bapaneh)* di Air Berunding sebagai pusat administrasi Asisten Wedana.[51] Proses kolonisasi ini sempat terhenti akibat pergolakan Perang Dunia II: pada tahun 1942, rombongan kolonisasi tahap kedua yang berlayar melalui Teluk Bayur dilaporkan mengalami serangan mortir oleh pasukan Jepang. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, kawasan ini mengalami masa-masa sulit berupa kelangkaan pangan dan sandang hingga tahun 1950.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[50]Ibid. Profil Nagari Desa Baru, dokumen sumber menyebut peristiwa ini terjadi "pada tanggal 01 Oktober 1961 yaitu pada masa Pemerintahan Sumatera Tegah," padahal Provinsi Sumatera Tengah secara administratif telah dibubarkan dan dipecah menjadi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi sejak tahun 1958. kemungkinan berupa kekeliruan pencatatan tahun pada dokumen asli atau penyebutan nama "Sumatera Tengah" yang masih dipakai secara kultural meski secara de jure provinsi tersebut sudah tidak ada.

[51]Pemerintah Nagari Desa Baru, "Profil Nagari Desa Baru," bagian "Legenda dan Sejarah Nagari." Bandingkan dengan Eni May, "Potret 3 Desa Transmigrasi Orang Jawa: Studi Kasus di Desa Tongar, Koja, dan Desa Baru Pasaman Sumatera Barat" (Padang, 2006), yang mencatat program kolonisasi di Kabupaten Pasaman berlangsung sejak masa Hindia Belanda awal abad ke-20 hingga masa Orde Baru.

Perkembangan penting berikutnya terjadi pada tahun 1948, ketika kawasan kolonisasi menerima kedatangan enam kepala keluarga (18 jiwa) asal Tapanuli, Sipirok, di bawah pimpinan Bapak Kustan kelompok yang kemudian menjadi salah satu unsur etnis Mandailing/Batak dalam keberagaman penduduk Desa Baru. Pada tahun 1950, Gubernur Sumatera Tengah, Bapak Ruslan Mulyoharjo, berkunjung ke kawasan ini membawa bantuan berupa beras, pakaian, dan kerbau. Kunjungan tersebut turut menjadi momentum bagi para ninik mamak dari tiga nagari asal (Batahan, Parit, dan Air Bangis) untuk bersepakat menambah jumlah warga kolonisasi sekaligus mengangkat status kawasan tersebut menjadi sebuah nagari.[52] Dari proses inilah, pada tanggal 26 Maret 1952, kawasan kolonisasi tersebut secara resmi dinamai Desa Baru.[53] Sepanjang dekade 1950-an hingga awal 1960-an, Nagari Desa Baru terus menerima penambahan penduduk, baik melalui program kolonisasi lanjutan maupun migrasi mandiri warga dari nagari-nagari sekitar yang membuka lahan pertanian baru di dalam wilayah nagari. Dinamika ini sejalan dengan pola umum desa-desa transmigrasi di Kabupaten Pasaman pada masa itu, yang mengalami pasang surut

UIN IMAM BONJOL PADANG

[52]Pemerintah Nagari Desa Baru, *"Profil Nagari Desa Baru,* bagian Legenda dan Sejarah Nagari, 2020

[53]Ela Yuliantri, *pola kemitraan tanam saham dalam pertanian jagung ditinjau dari fiqih muamalah mengenai sejarah kolonisasi* (Skripsi *,* fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang, Padang, 2024) hlm. 45, yang menyebutkan proses kolonisasi berlangsung antara tahun 1937–1960 dan penamaan "Desa Baru" ditetapkan pada 26 Maret 1952.

kehidupan seiring gejolak politik nasional, termasuk dampak Pemberontakan PRRI serta trauma politik pasca peristiwa G30S/PKI pada awal pemerintahan Orde Baru.[54]

Sejalan dengan pertambahan penduduk dan pemantapan kelembagaan nagari, dibentuk pula Kantor Seksi Transmigrasi di Desa Baru, dengan Bapak Niti Karno diangkat sebagai Wali Nagari pertama Desa Baru.[55] Sejak saat itu, kepemimpinan Nagari Desa Baru mengalami sejumlah pergantian, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2.2 Daftar Kronologis Pemimpin Nagari/Desa Baru, 1950–2025

No.	Nama	Jabatan	Periode
1	Niti Karno	Wali Nagari	1950–1957
2	Sukandar	Wali Nagari	1957–1963
3	M. Ali (Pjs.)	Wali Nagari	1963–1964
4	Kamad	Wali Nagari	1964–1965
5	Kasni Munasir	Wali Nagari	1965–1971

UIN IMAM BONJOL PADANG

[54]Eni May, *"Potret 3 Desa Transmigrasi Orang Jawa,"* yang mencatat desa-desa transmigrasi di Kabupaten Pasaman mengalami pasang surut sejalan dengan gejolak politik nasional tahun 1942–1965, termasuk trauma politik pasca peristiwa G30S/PKI pada awal pemerintahan Orde Baru tahun 1967.

[55]Pemerintah Nagari Desa Baru, *Profil* Nagari Desa Baru, bagian "Legenda dan Sejarah Nagari dan Tabel Nama-nama Wali Nagari Desa Baru, 2020

6	Abd. Rahman R.	Wali Nagari	1971 (± 3 bulan)
7	Sarengat (Pjs.)	Wali Nagari	1971 (± 6 bulan)
8	Kasni Munasir	Wali Nagari	1972–1975
9	Mahiddin Jamal, B.A. (Pjs.)	Wali Nagari	1975–1976
10	Kasman Pulungan	Wali Nagari	1976–1978
11	Tagor Nst. (Pjs.)	Wali Nagari	1978 (± 3 bulan)
12	Ishak Aman (Pjs.)	Wali Nagari	1978 (± 3 bulan)
13	Sarengat	Wali Nagari / Kepala Desa	1979–1984
14	Sarengat	Kepala Desa merangkap Ketua Kerapatan Desa	1984–2000
15	Wiyanto, S.Pd.	Wali Nagari (pasca-pemekaran 2001)	2001–2007
16	Hamulian, A.Md. (Pjs.)	Wali Nagari	2007–2008

UIN IMAM BONJOL PADANG

17	Suyadi Handoko	Wali Nagari	2008–2014
18	Mawardi Hendro	Wali Nagari	2014–2020

Sumber: diolah dari Profil Nagari Desa Baru, bagian "Legenda dan Sejarah Nagari," 2025.

Tabel di atas menarik untuk dibahas bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, status Nagari Desa Baru berubah menjadi Desa dengan jabatan Wali Nagari digantikan sebutan Kepala Desa, yang pada praktiknya tetap dijabat oleh tokoh yang sama, yaitu Sarengat, hingga tahun 2000.[56] Seiring pemekaran wilayah, di bawah struktur Desa Baru pada periode ini juga terbentuk tiga desa definitif, yaitu Desa Mulyorejo, Desa Sidomulyo, dan Desa Sukorejo, masing-masing dengan kepala desa tersendiri hingga tahun 2001.[57] Barulah pada tahun 2001, menyusul terbitnya Undang-Undan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengembalikan sistem pemerintahan desa ke sistem nagari di Sumatera Barat, status Desa Baru

UIN IMAM BONJOL PADANG

[56]Pemerintah Nagari Desa Baru, "Profil Nagari Desa Baru," bagian "Legenda dan Sejarah Nagari," mengenai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Nagari Desa Baru.

[57]Pemerintah Nagari Desa Baru, *Profil* Nagari Desa Baru, Tabel Nama-nama Kepala Desa Mulyorejo, Sidomulyo, dan Sukorejo, 2020

dikembalikan menjadi Nagari, dengan Wiyanto, S.Pd. diangkat sebagai Wali Nagari pertama pada era otonomi nagari yang baru.[58]

B. Kondisi Sosial dan Agama

Secara kelembagaan, struktur pemerintahan Nagari Desa Baru saat ini terdiri atas Pemerintah Nagari yang dipimpin Wali Nagari beserta perangkatnya, Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari sebagai unsur legislatif nagari, serta sejumlah lembaga kemasyarakatan pendukung, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Tim Penggerak PKK Nagari, dan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG).[59] Data kepengurusan terkini menunjukkan bahwa jabatan Ketua KAN Nagari Desa Baru dijabat oleh Kusni, dengan Sampir sebagai sekretaris dan Salimin sebagai bendahara suatu struktur nama yang, sebagaimana akan didiskusikan lebih lanjut pada Bab III, memperlihatkan pola yang konsisten dengan temuan awal penelitian ini mengenai dominasi tokoh non Minangkabau dalam struktur adat nagari.

Berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tahun 2025, jumlah penduduk Nagari Desa Baru tercatat sebanyak 4.635 jiwa, terdiri atas 2.333 jiwa laki-laki dan 2.302 jiwa

UIN IMAM BONJOL PADANG

[58]Pemerintah Nagari Desa Baru, "Profil Nagari Desa Baru," bagian "Legenda dan Sejarah Nagari," mengenai pemekaran Jorong Karang Rejo tahun 2001 dan pengangkatan kembali Wali Nagari.

[59]Pemerintah Nagari Desa Baru, "Profil Nagari Desa Baru," Tabel 6 "Pemerintah Nagari," Tabel 7 "BAMUS Nagari," dan Tabel 9 "KAN Nagari," 2025.

perempuan.[60] Struktur penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan piramida penduduk yang relatif muda, dengan proporsi terbesar berada pada kelompok usia produktif. Data ini digunakan dalam penelitian ini sebagai gambaran kondisi mutakhir wilayah, sementara data kependudukan pada rentang tahun kajian (1954–2000) akan disajikan secara khusus pada Bab III berdasarkan sumber arsip dan kesaksian lisan para informan.[61]

Tabel 2.3 Sarana Peribadatan Nagari Desa Baru Tahun 2025

No.	Sarana Ibadah	Jumlah (Unit)
1	Masjid	6
2	Mushala	1
3	Gereja	0

Sumber: Profil Nagari Desa Baru, Tabel 2.10, bagian "Prasarana Ibadah," 2025.

Data di atas memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Nagari Desa Baru saat ini beragama Islam, sebagaimana tercermin dari dominasi sarana ibadah berupa masjid dan mushala, tanpa keberadaan

[60]Pemerintah Nagari Desa Baru, "Profil Nagari Desa Baru," Tabel 2.2 "Jumlah Penduduk dan Proporsi Penduduk Nagari Desa Baru Tahun 2025," bersumber dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 2025.

[61]Data kependudukan tahun 2025 digunakan di sini sebagai gambaran kondisi mutakhir wilayah penelitian (monografi dasar), bukan sebagai representasi kondisi demografis pada rentang Tahun kajian 1954–2000; data historis periode kajian akan disajikan pada Bab III berdasarkan sumber arsip dan hasil wawancara.

UIN IMAM BONJOL PADANG

gereja. Kondisi ini menarik untuk didalami lebih lanjut, mengingat sebagian literatur mengenai transmigrasi di Kabupaten Pasaman menyinggung fenomena persebaran agama Kristen di sejumlah desa transmigrasi lain di kawasan tersebut,[62] sehingga pola keagamaan di Nagari Desa Baru khususnya perlu ditelusuri lebih jauh melalui wawancara untuk memahami proses asimilasi keagamaan yang terjadi sepanjang periode kajian.

Dari sisi kelembagaan sosial, Nagari Desa Baru memiliki sejumlah organisasi kemasyarakatan aktif, antara lain LPMN, Tim Penggerak PKK dengan 87 orang anggota, BUMNAG, Karang Taruna, serta 13 unit RT/RW yang tersebar di lima jorong.[63] Keberadaan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa meskipun berasal dari latar belakang etnis yang beragam, masyarakat Nagari Desa Baru telah membangun tatanan sosial kolektif yang relatif mapan sejak masa awal berdirinya nagari dalam ondisi sosial dapat dilihat dari interaksi mereka dipasar, meskipin dari etnk yang beragam mereka tetap rukun dan saling menghormati.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[62]Pemerintah Nagari Desa Baru, "Profil Nagari Desa Baru," Tabel 2.10 "Jumlah Sarana dan Prasarana yang ada di Nagari," bagian "Prasarana Ibadah," 2025.

[63]Pemerintah Nagari Desa Baru, "Profil Nagari Desa Baru," Tabel 2.3 "Sumber Daya Sosial Budaya Nagari Desa Baru," 2025.

C. Pendidikan, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat Nagari Desa Baru

Tabel 2.4 Sarana Pendidikan Nagari Desa Baru Tahun 2025

No.	Jenjang/Sarana	Jumlah (Unit)
1	PAUD/TK	3
2	SD/Sederajat	2
3	SMP/Sederajat	1
4	SMA/Sederajat	1
5	Perguruan Tinggi	0
6	Perpustakaan Nagari	1

Sumber: Profil Nagari Desa Baru, Tabel 2.10, bagian "Prasarana Pendidikan," 2025.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dari sisi pendidikan, Nagari Desa Baru telah memiliki jenjang pendidikan formal yang relatif lengkap mulai dari tingkat PAUD hingga SMA/sederajat, meskipun belum memiliki perguruan tinggi.[64] Ketersediaan sarana pendidikan ini menjadi salah satu indikator perkembangan sosial nagari sejak masa kolonisasi awal, ketika akses

[64]Pemerintah Nagari Desa Baru, *"Profil Nagari Desa Baru,"* Tabel 2.10 "Jumlah Sarana dan Prasarana yang ada di Nagari," bagian "Prasarana Pendidikan," 2025.

pendidikan formal masih sangat terbatas, hingga kondisinya pada masa kini.

Aspek budaya di Nagari Desa Baru memperlihatkan corak yang khas sebagai daerah multietnis. Nagari Desa Baru dihuni oleh masyarakat dari etnis Jawa, Mandailing, dan Melayu-Minangkabau. Keragaman tersebut tercermin dalam kehidupan kesenian masyarakat, antara lain melalui keberadaan wayang kulit dan kuda kepang sebagai kesenian yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa, tor-tor sebagai kesenian masyarakat Mandailing/Batak, serta jedor dan rebana sebagai kesenian bernuansa Islam yang berkembang di kalangan masyarakat Melayu-Minangkabau.[65] Keberagaman kesenian yang hidup berdampingan ini menjadi salah satu bukti nyata dari proses akulturasi budaya yang berlangsung di Nagari Desa Baru sepanjang sejarahnya, dan akan menjadi salah satu aspek penting yang didalami dalam pembahasan mengenai hubungan antaretnik pada Bab III.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dari sisi ekonomi, mata pencaharian utama penduduk Nagari Desa Baru adalah sektor pertanian. Data terbaru mencatat sebanyak 1.391 jiwa bekerja sebagai petani dan 291 jiwa sebagai buruh tani, menjadikan sektor ini sebagai penopang utama perekonomian nagari,

[65] Fahrezi, Pemerintahan Lokal Berbeda Etnis: *Studi Model Pelaksanaan Pemerintahan Nagari Beretnis Mandailing dan Jawa di Kabupaten Pasaman Barat* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 45.

diikuti oleh sektor wiraswasta/perdagangan sebanyak 285 jiwa.[66] Potensi lahan pertanian dan perkebunan di Nagari Desa Baru cukup luas, dengan komoditas unggulan berupa padi sawah, kelapa sawit, dan karet, di samping tanaman hortikultura seperti cabai dan berbagai jenis buah-buahan.[67] Meskipun demikian, data terkini memperlihatkan bahwa tingkat kesejahteraan sebagian penduduk Nagari Desa Baru masih tergolong rendah, dengan sebanyak 1.307 kepala keluarga atau sekitar 37,37 persen dari total penduduk tercatat sebagai keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

[66]Pemerintah Nagari Desa Baru, "Profil Nagari Desa Baru," Tabel 2.9 "Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan," 2025.

[67]Pemerintah Nagari Desa Baru, "Profil Nagari Desa Baru," Tabel 2.7 "Potensi Penggunaan Lahan" dan Tabel 2.8 "Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan," 2025.

BAB III
DINAMIKA KEPEMIMPINAN LOKAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUBUNGAN ANTAR ETNIK

A. Dinamika Kepemimpinan Lokal di Nagari Desa Baru Tahun 1954–2000

Sebelum sampai pada pembentukan jabatan Wali Nagari, penting untuk terlebih dahulu menelusuri bagaimana struktur kepemimpinan lokal yang berlaku pada masa kolonial, sebagai titik tolak paling awal dari dinamika kepemimpinan di kawasan yang kelak menjadi Nagari Desa Baru. Berdasarkan data monografi nagari, penyerahan ganti rugi tanah ulayat Ninik Mamak Nagari Air Bangis, Nagari Parit, dan Nagari Batahan kepada pemerintah kolonial Belanda dilakukan untuk membuka kawasan perkampungan, pertanian, dan perkebunan baru.[68] Setelah penyusunan Block Peta pada 29 Juni 1937 dan kedatangan rombongan pertama penduduk asal Pulau Jawa ke Air Bangis pada tahun yang sama, pembukaan lahan permukiman secara resmi dimulai pada tahun 1938 dengan terbentuknya tiga kawasan yang disebut Bedeng Timur, Bedeng Tengah, dan Bedeng Barat, seluruhnya berada

UIN IMAM BONJOL PADANG

[68]Esman, *Monografi Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat* (2020), hlm. 1, mengenai penyerahan ganti rugi tanah ulayat Ninik Mamak Nagari Air Bangis, Nagari Parit, dan Nagari Batahan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk pembukaan kawasan perkampungan, pertanian, dan perkebunan.

di bawah kepemimpinan seorang Asisten Wedana jabatan yang setingkat dengan Camat pada masa kini.[69]

Tabel 3.1 Struktur Kepemimpinan Lokal Masa Kolonial di Kawasan Desa Baru, 1938–1954

No.	Nama	Jabatan	Periode
1	R. Sutadi / Abdul Gani / Sarifuddin Tan Mangido	Asisten Wedana (setingkat Camat)	1938–1950
2	H. Imam	Kepala Bedeng Timur	1940–1949
3	Thamser	Kepala Bedeng Tengah	1940–1949
4	Kardi Syarif	Kepala Bedeng Barat	1940–1949
5	Amran Lubis	Kepala Bedeng Timur	1949–
6	Niti Karno	Wali Nagari Desa Baru	1950–1957
7	Regen Sutan Baringin	Kepala Seksi Transmigrasi	1950
8	Saridin	Sekretaris Seksi Transmigrasi	1950
9	Sabiruddin Tan Mangindo	Asisten Wedana	1950

Sumber: diolah dari Profil Nagari Desa Baru dan Esman, Monografi Nagari Desa Baru (2020).

UIN IMAM BONJOL PADANG

[69]Esman, *Monografi* Nagari Desa Baru, hlm. 2, mengenai pembukaan lahan Bedeng Timur, Bedeng Tengah, dan Bedeng Barat pada tahun 1938 di bawah pimpinan Asisten Wedana, serta pembentukan Pasanggrahan (Medan Bapaneh) di Air Berunding pada tahun 1940.

Struktur kepemimpinan pada periode tersebut memperlihatkan adanya dua lapis kepemimpinan yang berjalan secara berdampingan. Pada tingkat administratif kolonial, jabatan Asisten Wedana secara bergantian dipegang oleh R. Sutadi, Abdul Gani, dan Sarifuddin Tan Mangido. Sementara itu, pada tingkat permukiman atau kawasan setingkat jorong, setiap bedeng dipimpin oleh seorang Kepala Bedeng. Bedeng Timur dipimpin oleh H. Imam, Bedeng Tengah oleh Thamser, dan Bedeng Barat oleh Kardi Syarif. Ketiga tokoh tersebut tercatat menjabat pada periode 1940–1949. Pada tahun 1949, posisi Kepala Bedeng Timur kemudian beralih dari H. Imam kepada Amran Lubis. Keberadaan Kepala Bedeng sejak periode awal, bahkan sebelum terbentuknya lembaga Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), menunjukkan bahwa jabatan tersebut telah menjadi bagian penting dari struktur kepemimpinan di Desa Baru. Selain itu, apabila berdasarkan sumber sejarah tokoh-tokoh tersebut diketahui memiliki latar belakang etnis Jawa, hal ini dapat menjadi bukti bahwa keterlibatan masyarakat Jawa dalam kepemimpinan lokal telah muncul sejak masa awal bahkan sebelum lembaga Wali Nagari maupun KAN terbentuk. Dengan demikian, dominasi atau keterlibatan tokoh Jawa dalam kepemimpinan Desa Baru bukan semata-mata fenomena yang muncul pada masa

UIN IMAM BONJOL PADANG

mendatang, melainkan memiliki akar sejak terbentuknya struktur kepemimpinan paling dasar di kawasan tersebut.[70]

Menjelang peralihan status kawasan kolonisasi menjadi Nagari, dibentuk pula Kantor Seksi Transmigrasi Desa Baru dengan susunan pejabat sebagai berikut: Niti Karno diangkat sebagai Wali Nagari Desa Baru, Regent Sutan Baringin sebagai Kepala Seksi Transmigrasi, Saridin (berasal dari Lubuk Sikaping) sebagai Sekretaris Seksi Transmigrasi, dan Sabiruddin Tan Mangido sebagai Asisten Wedana.[71] Struktur kepemimpinan inilah yang menarik untuk diteliti karena memperlihatkan perpaduan etnis yang heterogen/beragam pada jajaran pejabat lokal dengan Niti Karno yang diperkirakan beretnis Jawa memimpin sebagai Wali Nagari, berdampingan dengan pejabat-pejabat lain yang namanya mengindikasikan latar belakang etnis Mandailing (Sabiruddin Tan Mangido, Regent Sutan Baringin) sebuah pola kepemimpinan kolaboratif lintas etnis yang, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, terus berlanjut sepanjang sejarah Nagari Desa Baru. Struktur

UIN IMAM BONJOL PADANG

[70] Esman, Monografi Nagari Desa Baru, hlm. 2. Bandingkan dengan Pemerintah Nagari Desa Baru, "Profil Nagari Desa Baru," bagian "Legenda dan Sejarah Nagari," yang mencatat nama-nama Kepala Bedeng: H. Imam (Kepala Bedeng Timur, 1940–1949), Thamser (Kepala Bedeng Tengah, 1940–1949), dan Kardi Syarif (Kepala Bedeng Barat, 1940–1949), dengan Amran Lubis menggantikan H. Imam sebagai Kepala Bedeng Timur pada tahun 1949; serta nama-nama Asisten Wedana: R. Sutadi, Abdul Gani, dan Sarifuddin Tan Mangido.

[71]Pemerintah Nagari Desa Baru, *Profil Nagari Desa Baru*, bagian Legenda dan Sejarah Nagari, mengenai susunan pejabat Kantor Seksi Transmigrasi Desa Baru: Niti Karno sebagai Wali Nagari, Regent Sutan Baringin sebagai Kepala Seksi Transmigrasi, Saridin sebagai Sekretaris Seksi Transmigrasi, dan Sabiruddin Tan Mangido sebagai Asisten Wedana.

kepemimpinan inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi terbentuknya Nagari Desa Baru secara resmi pada 26 Maret 1952.[72]

Sampir, Ketua KAN Desa Baru saat ini, menambahkan bahwa tanah yang ditempati transmigran sejak awal telah diblok oleh pemerintah kolonial dan mendapat izin dari ninik mamak setempat sebagai tanah cadangan *"tanah alpa"* untuk perkebunan, fondasi status tanah yang kelak menjelaskan mengapa Desa Baru relatif bebas dari konflik tanah ulayat di sepanjang periode kajian.[73]

Menurut penuturan Sampir, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Desa Baru saat ini, kedatangan penduduk Jawa ke kawasan yang kelak menjadi Nagari Desa Baru telah berlangsung sejak tahun 1939, pada masa yang dikenal dengan istilah kolonisasi, yakni sebelum Indonesia merdeka, tatkala kondisi kehidupan ekonomi rakyat masih sangat sulit.[74] Pada masa kemerdekaan, kedatangan penduduk Jawa berlanjut melalui program pemerintah yang dikenal dengan istilah transmigrasi, dengan asal daerah yang berbeda-beda seperti; Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat ditambah pula migrasi lokal dari daerah sekitar. Menurut catatan Sampir, transmigran asal Jawa Tengah pada masa itu hanya berjumlah 42 kepala keluarga, sedangkan mayoritas

UIN IMAM BONJOL PADANG

[72]Esman, Monografi Nagari Desa Baru, hlm. 3, mengenai penamaan resmi "Desa Baru" pada 26 Maret 1952 serta perkembangan pembukaan lahan lanjutan hingga tahun 1960.

[73]Sampir, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Desa Baru, *wawancara pribadi*, Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026.

[74] Sampir, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Desa Baru, *wawancara,* Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026.

berasal dari Jawa Timur, dan sebagian besar di antaranya kemudian bermukim di kawasan yang saat ini dikenal dengan nama Jorong Sepakat Madani.[75]

Keterangan ini menarik untuk diperbandingkan dengan kesaksian informan lain. Klinem, seorang transmigran generasi pertama yang saat wawancara dilakukan telah berusia 106 tahun, menyebutkan bahwa ia datang ke Desa Baru pada tahun 1953 bersama rombongan 42 kepala keluarga asal Jawa Tengah, dan mula-mula menetap di kawasan Gunung Sari.[76] Keterangan yang hampir serupa disampaikan oleh pasangan Tarmini dan Sawale, transmigran asal Pekalongan, yang juga menyebut tahun 1953 sebagai tahun kedatangan mereka, ketika kawasan Desa Baru masih berupa hutan rimba yang harus dibuka secara mandiri oleh para transmigran.[77]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Nizaruddin, mantan Sekretaris Desa Baru, menyampaikan versi lain menurutnya, rombongan transmigrasi yang kemudian ditempatkan di Desa Baru semula direncanakan untuk diarahkan ke Lampung, namun kemudian dialihkan ke Pasaman berdasarkan informasi kesuburan tanah di

[75]Sampir, *wawancara pribadi*, Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026

[76]Klinem, transmigran asal Jawa Tengah*, wawancara pribadi*, Nagari Desa Baru. 13 Juni 2026. Informan menyebutkan kedatangannya pada tahun 1953 bersama rombongan 42 kepala keluarga, menetap mula-mula di kawasan Gunung Sari.

[77]Tarmini dan Sawale, pasangan transmigran asal Pekalongan, *wawancara pribadi,* Nagari Desa Baru. 13 Juni 20226. Keduanya bekerja sebagai petani dan datang ke Desa Baru pada tahun 1953.

kawasan tersebut.[78] Menariknya, tahun kedatangan 1953 yang disebutkan kedua kelompok informan ini bukan sekadar kesaksian lisan yang berdiri sendiri, melainkan dikonfirmasi oleh sumber arsip independen yang sama sekali di luar penelitian ini: Zaiyardam Zubir, dalam Radikalisme Kaum Pinggiran, mengutip Majalah Minangkabau No. 1 Tahun ke-5 (1935) yang mencatat tahun 1935 sebagai tahun sampainya orang Jawa di Desa Baru untuk membuka hutan sebagai lahan pertanian sebuah triangulasi silang yang memperkuat keabsahan periodisasi penelitian ini.[79] Uraian pada periode ini dengan demikian bersandar pada data dokumenter monografi nagari.[80]

Mengenai status tanah yang ditempati, Sampir menjelaskan bahwa tanah tersebut sejak awal telah diblok oleh pemerintah kolonial Belanda dan telah mendapat izin dari ninik mamak setempat, dijadikan sebagai tanah cadangan *("tanah alpa")* untuk keperluan perkebunan, dengan bangunan perkantoran kolonial yang didirikan di kawasan Bukit Tengah-Tengah, Balai Selasa yang kini digunakan sebagai kantor Wali Nagari Desa Baru

UIN IMAM BONJOL PADANG

[78]Nizaruddin, mantan Sekretaris Desa Baru dan anggota Bamus pada masa Nagari, *wawancara pribadi,* Nagari Desa Baru. 13 Juni 2026.

[79]Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan* (Yogyakarta: Insist Press, 2002), hlm. 162, mengutip Majalah Minangkabau No. 1 Tahun ke-5 (1935), yang mencatat bahwa pada tahun 1935 orang Jawa telah sampai di Desa Baru, sebuah wilayah kolonisasi di Pasaman, untuk membuka hutan sebagai lahan pertanian sebuah sumber arsip independen yang mengonfirmasi kesaksian lisan Klinem serta Tarmini dan Sawale mengenai tahun kedatangan mereka.

[80]Catatan metodologis: kesaksian lisan Klinem serta Tarmini dan Sawale merupakan kesaksian tentang pengalaman migrasi dan penetapan awal permukiman, bukan kesaksian langsung mengenai struktur kepemimpinan pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal, mengingat pada masa itu mereka adalah warga biasa yang belum terlibat dalam struktur pemerintahan nagari.

Barat.[81] Keterangan senada disampaikan oleh Sukri, Sekretaris Nagari Desa Baru, yang menuturkan cerita dari orang tuanya bahwa tanah yang ditempati transmigran merupakan tanah kolonial, yang semula adalah tanah ulayat raja-raja setempat yang telah diserahkan kepada pemerintah kolonial untuk dijadikan lahan perkebunan.[82] Kesaksian-kesaksian ini secara konsistenn menguatkan temuan awal penelitian bahwa status tanah di Nagari Desa Baru bukanlah tanah ulayat adat, melainkan tanah bekas kolonial/tanah negara, sehingga sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada sub-bab kawasan ini secara historis relatif bebas dari konflik agraria berbasis adat yang lazim terjadi di kawasan transmigrasi lain di Sumatera Barat.

1. Kepemimpinan pada fase wali nagari (1950-1979)

Ikhsanuddin, kepala seksi pemerintahan nagari Desa Baru, menegaskan bahwa sebelum indonesia merdeka, kepemimpinna dikawasan nagari desa baru secara konsisten sudah didominasi oleh etnis Jawa, sejalan dengan persentase penduduk yang memang telah didominasi oleh etnis tersebut. Meski demikian, menurutnya, sikap kepemimpinan yang terbentuk tidak pernah bersifat eksklusif : para pemimpin berusaha merangkul tiga unsur etnis utama Jawa, Mandailing (Tapanuli), dan Minangkabau/melayu tanpa memeda-bedakan satu

UIN IMAM BONJOL PADANG

[81]Sampir, *wawancara pribadi*. Bandingkan dengan Pemerintah Nagari Desa Baru, "Profil Nagari Desa Baru," bagian "Legenda dan Sejarah Nagari," mengenai penyerahan tanah ulayat oleh ninik mamak tiga nagari pada masa kolonial.

[82]Sukri, mantan Sekretaris Nagari Desa Baru, kini Sekretaris Desa Baru Barat, *wawancara pribadi*, Nagari Desa Baru. 13 Juni 2026. Informan turut menyampaikan cerita dari orang tuanya.

sama lain.[83] Pernyataan ini sejalan dengan data kronologis yang telah diuraikan pada Bab II, dimana jabatan wali nagari sejak Jabat6an Niti Karno (1950-1957) hingga eberapa periode berikutnya secara berturut-turut dipegang oleh tokoh beretnis Jawa.

Sampir turut menegaskan bahawa sejak berdirinya Desa Baru memang telah dipimpin oleh tokoh beretnis Jawa, dan sepanjang pengetahuannya belum pernah terjadi konflik terbuka akibat perbedaan etnis, karena kepemimpinan yang terbentuk tidak pernah bersikap deskriminatif terhadap kelompok etnis manapun.[84] Ia juga menuturkan bahwa dirinya merupakan generasi kedua transmigran dan ayahnya merupakan transmigran pertama yang kemudian dipercaya masyarakat untuk memimpin KAN, menunjukkan adanya pola pewarisan pengaruh sosial dari generasi pertama transmigran kepada generasi penerusnya di dalam struktur kepemimpinan lokal.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Kepemimpinan pada fase peralihan sitem Nagari ke Desa serta Dinamika pergantian etnis kepemimpinan (1979-2000)

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 turut mengubah nomenklatur kepemimpinan nagari menjadi "Kepala Desa", Menurut Irhash A. Shamad, kebijakan penyeragaman ini merupakan bagian dari strategi resentralisasi Orde Baru yang bertujuan

[83] Ikhsanuddin, Kepala seksi pemerintahan, *Wawancara Pribadi*, Nagari Desa Baru. 13 Juni 2026.

[84] Sampir, Ketua KAN, *wawancara pribadi*. Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026

memudahkan kontrol politik dari pemerintah pusat terhadap daerah, meskipun harus mengorbankan otonomi kelembagaan adat lokal di Sumatera Barat, jorong berubah nomenklatur menjadi dusun dan peran tokoh adat mengalami pemarjinalan struktural.[85] Desa Baru tetap dijabat oleh tokoh yang sama, Sarengat, hingga tahun 2000, sementara di bawahnya terbentuk tiga desa definitif Mulyorejo, Sidomulyo, dan Sukorejo masing-masing dengan kepala desa tersendiri.[86] Sukri, yang pernah menjabat Sekretaris Nagari Desa Baru, menuturkan bahwa meskipun status berubah dari nagari menjadi desa, KAN tetap dipertahankan meski dengan karakter berbeda dari KAN di daerah asli Minangkabau, karena masyarakat Desa Baru sejak awal adalah masyarakat transmigran tanpa struktur ninik mamak.[87] Suryadi menambahkan bahwa pada masa-masa akhir periode ini, kepemimpinan lokal mulai memberikan dampak pembangunan yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

[85]Irhash A. Shamad, *Hegemoni Politik Pusat dan Kemandirian Etnik di Daerah: Kepemimpinan Sumatera Barat di Masa Orde Baru* (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 2001), Bagian 3, mengenai kebijakan resentralisasi Orde Baru yang menyeragamkan sistem pemerintahan desa demi kemudahan kontrol politik pusat, dengan konsekuensi memarjinalkan peran kelembagaan adat lokal seperti KAN.

[86]Pemerintah Nagari Desa Baru, "Profil Nagari Desa Baru," bagian "Legenda dan Sejarah Nagari," mengenai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Sarengat menjabat Wali Nagari/Kepala Desa sejak 1979 hingga 1984, dilanjutkan sebagai Kepala Desa merangkap Ketua Kerapatan Desa 1984–2000.

[87]Sukri, mantan Sekretaris Nagari Desa Baru, kini Sekretaris Desa Baru Barat, *wawancara pribadi*, Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026. Informan turut menyampaikan cerita dari orang tuanya.

lebih nyata, seperti pembangunan gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) pada masa Bupati Syahiran.[88]

Di Nagari Desa Baru, peralihan ini diwarnai oleh rangkaian pergantian kepemimpinan: Kasni Munasir (1965–1971), Abd. Rahman R. (1971, tiga bulan), Sarengat sebagai Pjs. (1971, enam bulan), Kasni Munasir kembali menjabat (1972–1975), Mahiddin Jamal, B.A. sebagai Pjs., hingga Kasman Pulungan (1976–1978) sebuah nama bermarga Mandailing yang menandai salah satu momen pergeseran etnis kepemimpinan pada masa ini disusul Tagor Nasution sebagai Pjs. dan Ishak Aman sebagai Pjs. pada tahun 1978, sebelum Sarengat menjabat Wali Nagari/Kepala Desa sejak 1979 hingga 1984, dan berlanjut sebagai Kepala Desa merangkap Ketua Kerapatan Desa dari 1984 hingga 2000.[89] Temuan ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru tidak bersifat statis yang hanya dikuasi oleh satu kelompok etnis sepanjang masa, melainkan mengalami dinamika pergantian kepemimpinan yang mencerminkan proses demokratisasi dan keterbukaan sosial-politik ditingkat lokal.

Nizaruddin turut menjelaskan konteks struktural dibalik pergantian sistem nagari menjadi desa. Ia menuturkan bahwa pada masa

UIN IMAM BONJOL PADANG

[88]Suryadi, keturunan transmigran Jawa, *wawancara pribadi*, Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026.

[89]Pemerintah Nagari Desa Baru, "*Profil Nagari Desa Baru*," Tabel Nama-nama Wali Nagari Desa Baru.

pemerintahan wali nagari, keberadaan KAN dengan falsafah adat basandi syarak , syarak basandi kitabullah senantiasa memiliki peran; namun ketika sistem nagari berganti menjadi desa dengan corak pemerintahan yang lebih administratif, muncul kekhawatiran dikalangan tokoh masyarakat bahawa peran KAN akan hilang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut peraturan nagariyang berlaku saat itu, kebedaan KAN tetap diharuskan dan pengurus tetap ditunjuk, meskipun dengan karakter yang berbeda dari KAN di darah-daerah asli Minangkabau, mengingat maasyarakat Desa Baru adalah Masyarakat transmigran yang sejak awal tidak memiliki struktur ninik mamak secara genealogis.[90]

Senada dengan itu, Ikhsanuddin menjelaskan bahwa peralihan status dari nagari menjadi desa memang membawa dinamika pemerintahan tersendiri, karena nagari merupakan simbol identitas Sumatera Barat, sehingga peralihan ke sistem desa dikhawatirkan menghilangkan nilai-nilai sejarah kelembagaan adat setempat.[91] Meski Desa Baru merupakan daerah transmigrasi yang penduduknya bukan etnis Minangkabau asli, masyarakat tetap mengikuti falsafah Minangkabau tersebut karena mereka hidup dan menetap di wilayah

UIN IMAM BONJOL PADANG

[90] Nizaruddin, mantan kepala desa*, wawancara pribadi*, Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026

[91] Ikhsanuddin, Kepala seksi pemerintahan, *Wawancara Pribadi*, Nagari Desa Baru. 13 Juni 2026.

Sumatera Barat sebuah proses adabtasi kultural yang menjadi salah satu kekhasan Nagari Desa Baru diandingkan daerah transmigrasi lain.

Penulis tidak menemukan kesaksian mengenai resistensi terbuka dalam bentuk penolakan kolektif, protes formal, atau konflik terhadap kepemimpinan etnis Jawa di ranah pemerintahan nagari/desa. Namun demikian, ditemukan bentuk resistensi yang lebih halus dan bersifat kelembagaan-simbolis pada level kekhawatiran normatif: sebagaimana disampaikan Ikhsanuddin, muncul kekhawatiran di kalangan sebagian tokoh masyarakat bahwa peralihan sistem nagari ke desa dapat menghilangkan nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, sehingga upaya mempertahankan kelembagaan KAN meski dengan kewenangan terbatas pada masa sistem desa dapat dibaca sebagai bentuk resistensi kultural terhadap penyeragaman administratif dari pusat bukan resistensi terhadap etnis Jawa yang memimpin, melainkan terhadap hilangnya kerangka adat itu sendiri. Temuan ini sejalan dengan analisis Shamad bahwa resistensi terhadap kebijakan resentralisasi Orde Baru di Sumatera Barat pada umumnya berlangsung secara kultural-simbolis, bukan konfrontatif secara terbuka.[92]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[92]Irhash A. Shamad, *Hegemoni Politik Pusat dan Kemandirian Etnik di Daerah: Kepemimpinan Sumatera Barat di Masa Orde Baru* (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 2001), Bagian 3, mengenai kebijakan resentralisasi Orde Baru yang menyeragamkan sistem pemerintahan desa demi kemudahan kontrol politik pusat, dengan konsekuensi memarjinalkan peran kelembagaan adat lokal seperti KAN.

3. Peralihan fase pemerintahan Nagari (1998–2000)

Bergulirnya Reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan besar pada tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk di Nagari Desa Baru. Nizaruddin menuturkan bahwa menjelang akhir periode kajian ini terjadi peralihan kepemimpinan dari etnis Jawa kepada etnis Mandailing melalui mekanisme pemilihan yang demokratis, sejalan dengan keterbukaan pola pikir masyarakat mengenai keterwakilan etnis dalam kepemimpinan.[93] Keterangan ini konsisten dengan data dokumentasi nagari yang mencatat Kasman Pulungan bermarga Mandailing pernah menjabat Wali Nagari pada periode 1976–1978, membuktikan bahwa pergeseran etnis kepemimpinan bukan fenomena tunggal, melainkan pola yang berulang menjelang pergantian setiap era pemerintahan.[94]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pada penghujung periode kajian ini, terbit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang membuka kembali ruang bagi daerah-daerah di Sumatera Barat untuk kembali menerapkan sistem pemerintahan nagari, dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang

[93]Nizaruddin, *wawancara pribadi.* Informan menuturkan adanya peralihan kepemimpinan dari etnis Jawa kepada etnis Mandailing melalui mekanisme pemilihan.

[94]Pemerintah Nagari Desa Baru, "*Profil Nagari Desa Baru,"* Tabel Nama-nama Wali Nagari Desa Baru, mencatat Kasman Pulungan menjabat Wali Nagari 1976–1978, disusul Pjs. Tagor Nasution pada tahun 1978.

Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.[95] Ikhsanuddin mencatat bahwa pada masa transisi menjelang kembalinya sistem nagari ini, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bawah kepemimpinan Bupati Baharuddin R. mulai menghidupkan kembali kelembagaan adat di kawasan transmigrasi, termasuk mengumpulkan kembali para ketua KAN dan menghidupkan fungsi surau, paga nagari, serta bundo kanduang meskipun proses ini secara resmi baru terwujud penuh setelah tahun 2000 dan karenanya berada pada batas akhir periode kajian ini.[96]

Nizaruddin sendiri turut mengalami transisi ini secara langsung: ia menjabat Sekretaris Desa sejak SK pertama tahun 1998 hingga dua periode, termasuk sempat menjadi Pj. Kepala Desa karena Kepala Desa sebelumnya mencalonkan diri menjadi Wali Nagari pada masa peralihan tersebut.[97] Tahun 2000 dengan demikian menjadi penutup yang tepat bagi fase historis kepemimpinan lokal berbasis sistem desa di Nagari Desa Baru, sekaligus pembuka babak baru menuju era otonomi nagari yang berada di luar batasan penelitian ini.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[95]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, ditetapkan 16 Desember 2000.

[96]Ikhsanuddin, *wawancara pribadi*. Informan menyebut era Bupati Baharuddin R. sebagai periode dihidupkannya kembali kelembagaan adat berupa surau, KAN, paga nagari, dan bundo kanduang di kawasan transmigrasi.

[97]Nizaruddin, Masyarakat Nagari Desa Baru, *wawancara,* Nagari Desa Baru, 2026

B. Dampak Dinamika Kepemimpinan Lokal terhadap Struktur Sosial dan Hubungan Antaretnik Tahun 1954–2000

Pada periode paling awal ini, dampak paling mendasar dari pola kepemimpinan dan kebijakan penempatan transmigran adalah terbentuknya struktur sosial yang sejak semula bersifat heterogen namun terkonsentrasi berdasarkan kelompok asal (bedeng), sebagaimana tercermin dari terkonsentrasinya warga etnis Jawa di kawasan yang kini menjadi Jorong Sepakat Madani.[98] Pola pemukiman berbasis kelompok ini menjadi cikal bakal struktur sosial berbasis jorong yang bertahan hingga hari ini. Dampak penting kedua adalah dampak agraria: karena kepemimpinan kolonial telah menuntaskan penyerahan status tanah ulayat menjadi tanah kolonisasi sejak sebelum periode kajian dimulai, struktur penguasaan lahan di Desa Baru sejak awal tidak meninggalkan celah bagi klaim tanah ulayat adat, sebuah kondisi struktural yang terus berdampak pada minimnya konflik agraria di sepanjang periode-periode berikutnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1. Perkawinan silang dan penguasaan Multibahasa sebagai perekat sosial

Salah satu dampak nyata dari pola kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru adalah terbentuknya relasi antar etnik yang cair dan harmonis, dapat dilihat dari tingginya angka perkawinan

[98]Sampir, Ketua KAN Nagari Desa Baru, *wawancara pribadi,* 13 Juni 2026

campur anatr etnis. Sampir menuturkan bahwa pada masa awal, perselisihan paham antaretnis pernah terjadi, namun pada masa-masa belakangan hal tersebut sudah tidak pernah lagi terjadi, seiring dengan semakin banyaknya perkawinan silang antara etnis Jawa dengan Minangkabau, Jawa dengan Mandailing, maupun Mandailing dengan Minangkabau.[99]Ia bahkan menegaskan sebuah ungkapan lokal yang berkembang di masyarakat, bahwa seseorang belum dapat mengklaim diri sebagai putra daerah Desa Baru yang sesungguhnya apabila belum menguasai tiga bahasa Jawa, Mandailing, dan Minangkabau karena penduduk setempat memang terbiasa dilatih dengan kekayaan bahasa tersebut sejak kecil.

Praktik keagamaan dan adat-istiadat, masyarakat Desa Baru menganut falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah sebagaimana lazim di Minangkabau, namun hal ini tidak menutup kemungkinan penggunaan adat lokal masing-masing etnis Jawa, Mandailing, maupun Minangkabau terutama dalam upacara pernikahan, yang pemilihannya diserahkan sepenuhnya kepada kedua mempelai.[100]Pola akulturasi serupa turut disampaikan oleh Sawale, yang menyebutkan bahwa masyarakat Desa Baru kerap mengadakan perayaan musim panen secara bersama-sama, yang diikuti oleh seluruh etnis yanag ada di daerah

UIN IMAM BONJOL PADANG

[99] Sampir, *wawancara pribadi,* ketua KAN, Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026
[100] Sampir, Ketua KAN Nagari Desa Baru, *wawancara pribadi,* 13 Juni 2026

nagari Desa Baru yang hidup saling berdampingan dengan suasana kekeluargaan.[101]

2. Ketiadaan Konflik Tanah Ulayat dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Ikhsanuddin secara tegas menjelaskan bahwa sepanjang sejarah Nagari Desa Baru, belum pernah terjadi konflik antaretnis yang serius. Ia menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku: apabila suatu perkara menyangkut tindak pidana, penyelesaiannya diserahkan kepada pihak kepolisian; sedangkan apabila menyangkut persoalan tanah, karena Desa Baru tidak memiliki tanah ulayat melainkan tanah pemerintah bekas kolonial maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur Wali Nagari dan Kepala Jorong, dengan melibatkan Ketua KAN serta perwakilan masing-masing suku/etnis, termasuk kepala adat dari kalangan Mandailing/Tapanuli, yang tetap berada di bawah koordinasi KAN.[102] Ia menambahkan bahwa sengketa yang pernah terjadi di Desa Baru hanya berkisar pada persoalan warisan tanah antar keluarga, bukan konflik agraria berbasis etnis atau perebutan tanah ulayat. Peran Wali Nagari dalam persoalan pertanahan pun bersifat terbatas: menurut Ikhsanuddin, Wali Nagari Desa Baru tidak

UIN IMAM BONJOL PADANG

[101] Sawale, *wawancara pribadi*, Masyarakat Desa Baru, 13 Juni 2026

[102] Ikhsanuddin, Masyarakat Nagari Desa Baru, *wawancara,* Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026

memiliki kewenangan mengurus tanah ulayat sebagaimana wali nagari di daerah lain di Sumatera Barat, karena kewenangannya hanya mencakup pengesahan status tanah milik pribadi warga.[103] Sukri turut mengonfirmasi bahwa status tanah di Desa Baru adalah tanah kolonial, bukan tanah ulayat, sehingga pola kepemimpinan yang terbentuk tidak pernah bersinggungan dengan kompleksitas sengketa tanah ulayat yang lazim terjadi di banyak kawasan transmigrasi lain di Minangkabau.[104]

3. Gotong Royong dan Modal Sosial dalam Menjaga Harmoni Antaretnik Modal

Sosial berupa tradisi gotong royong turut menjadi salah satu faktor perekat hubungan antaretnik di Nagari Desa Baru. Bapak Sukri menuturkan bahwa masyarakat Desa Baru terbiasa mengadakan kegiatan gotong royong bersama lintas etnis, meskipun ia turut mencatat adanya pergeseran pada masa belakangan, dari gotong royong berbasis tenaga menjadi kontribusi berbasis iuran uang atau sumbangan.[105]Nizaruddin turut mengatakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana nagari pada masa Desa seperti kantor desa banyak dilakukan secara

UIN IMAM BONJOL PADANG

[103] Ikhsanuddin, Masyarakat Nagari Desa Baru, *wawancara,* Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026

[104] Sukri, wawancara pribadi. Informan menjelaskan bahwa meskipun status berubah dari nagari menjadi desa, kelembagaan KAN tetap dipertahankan meski dengan kewenangan yang lebih terbatas dibandingkan pada masa nagari.

[105] Sukri, *wawancara pribadi*, Desa Baru, 13 Juni 2026

swadaya masyarakat melalui tenaga gotong royong lintas etnis.[106]

Aspek kepemimpinan turut memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial ini. Nizaruddin menyampaikan sebuah semboyan Jawa yang menjadi pegangan para pemimpin Desa Baru, yaitu ing ngarso sung tulodo prinsip bahwa seorang pemimpin harus mampu menjadi suri tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya, senantiasa menjaga etika, dan mengedepankan musyawarah dibandingkan sikap otoriter dalam mengambil keputusan. Ia turut mencontohkan langkah konkret kepemimpinan pada masanya dalam memberantas praktik perjudian di tengah masyarakat, didorong oleh kekhawatiran akan dampak buruknya terhadap generasi mendatang, serta penerapan sistem ronda malam (hansip) sebagai bentuk pengabdian bersama warga lintas etnis.

4. Dampak Kepemimpinan terhadap pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat

Selain berdampak pada relasi sosial antaretnik, dinamika kepemimpinan lokal turut memberikan dampak nyata terhadap pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat Desa Baru. Suryadi menuturkan bahwa kondisi Desa Baru pada masa lampau masih sangat terpencil, dengan permukiman beratapkan rumbia di

[106] Nizaruddin, Masyarakat Nagari Desa Baru, *wawancara,* Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026

UIN IMAM BONJOL PADANG

atas lahan bekas rawa-rawa yang digarap secara bertahap oleh masyarakat. Ia mencatat bahwa kepemimpinan Wali Nagari pada periode-periode terakhir memberikan dampak pembangunan yang cukup signifikan, misalnya pembangunan gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) pada masa kepemimpinan Bupati Syahiran, yang menurutnya turut memiliki andil penting dalam pembangunan tersebut.[107] Ia juga mencatat bahwa persoalan ketersediaan air bersih di Desa Baru relatif tidak menjadi kendala berarti bagi masyarakat setempat. Dari sisi pemerintahan, Nizaruddin turut menuturkan bagaimana masyarakat pada masa kepemimpinan Kepala Desa turut dilibatkan dalam pembangunan sarana publik, seperti pasar, serta penanganan persoalan sosial seperti perjudian, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal di Desa Baru pada masa itu tidak hanya berorientasi pada aspek administratif-formal, tetapi juga pada pembinaan sosial-moral masyarakat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Secara keseluruhan, rangkaian kesaksian dari sembilan informan tersebut memperlihatkan benang merah yang konsisten: kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru, meskipun secara historis didominasi oleh etnis Jawa dan berlangsung dalam kerangka kelembagaan yang meniru sistem nagari Minangkabau, pada praktiknya bersifat inklusif dan adaptif, terbuka terhadap

[107] Suryadi, *wawanacara pribadi,* Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026

pergantian etnis melalui mekanisme demokratis, serta berhasil menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman etnis tanpa pernah terjerumus ke dalam konflik terbuka. Dinamika inilah yang menjadikan Nagari Desa Baru sebagai kasus yang khas dan layak dijadikan penelitian dalam kepemimpinan lokal di kawasan transmigrasi multietnis di Indonesia.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dinamika kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru, kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, dapat dismpulkan bahwa pertama, dominasi etnis Jawa dalam kepemimpinna Nagari Desa Baru bukanlah suatu fenomena yang datang secara tiba-tiba, melainkan telah tertanam sejak fondasi paling awal struktur kepemimpinna kawasan ini, yakni sejak jabatan kepala Bedeg pada masa kolonial (1940-1949) yang telah dipegang oleh tokoh-tokoh yang beretnis Jawa, jauh sebelum wali Nagari maupun Kerapatan Adat Nagari (KAN) secara formal terbentuk penelitian ini turut dikuatkan oleh triangulasi sumber independen kutipan arsip Majalah Minangkabau tahun 1935 dalam karya Zaiyardam Zubir yang mengonfirmasi kesaksian lisan informan mengenai tahun kedatangan transmigran Jawa.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Struktur ini terus berlanjut sebagaimana tergambar dari rangkaian nama pemimpin sejak Niti Karno hingga penghujung wali Nagari pertama. Namun demikian, kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru tidak bersifat statis, pada masa peralihan sistem nagari menjadi Desa (1979-2000), penelitian ini menemukan bukti nyata terjadinya pergeseran etnis dalam jabatan kepemimpinan secara demokratis, sebagaimana tercermin dari terpilihnya kasman pulungan tokoh beretnis Mandailing sebagai Wali Nagari pada periode 1976-1978,

yang dikuatkan oleh kesaksian informan mengenai adanya pemilihan kepemimpinan yang secara terbuka mengakomodasi keterwakilan etnis diluar Jawa. Dinamika ini menegaskan bahawa kepemimpinan lokal di Nagari Desa Baru merupakan hasil interaksi berkelanjutan antara faktor demografis (dominasi jumlah penduduk etnis Jawa), faktor Struktural (mekanisme pembentukan KAN melalui perwakilan jorong, bukan garis keturunan ninik mamak sebagaiman lazimnya di nagari-nagari asli minangkabau), serta faktor politik administratif (perubahan kebijakan nasional dari sistem nagari ke sistem desa dan juga sebaliknya).

Kedua, terkait dampak dinamika kepemimpinan lokal terhadap struktur sosial masyarakat dan hubungan anatr etnik, penelitian ini menyimpulakan bahwa pola kepemimpinan yang inklusif dan tidak diskriminatif terhadap kelompok etnis manapundan merupakan salah satu faktor kunci terciptanya harmoni sosial ditengah keberagaman etnis Jawa, Mandailing dan Minangkabau di Nagari Desa Baru. Kepemimpinan yang berhasil merangkul ketiga unsur etnis tanpa harus membeda-bedakan telah mendorong terbentuknya modal sosial yang kuat, tercermin dari tingginya angka pernikahan campur antar etnis, serta ketiadaan konflik tanah ulayat adat, melainkan tanah bekas kolonial/tanah negara. Ketiadaan konflik antar etnis yang berarti sepanjang periode kajian membuktikan bahwa keberagaman etnis disuatu wilayah tidak secara otomatis melahirkan konflik sosial,

UIN IMAM BONJOL PADANG

melainkan sangat bergantung pada karakter dan orientasi kepemimpinan lokal yang menaunginya.

Demikian dapat disimpulkan bahwa Nagari Desa Baru merupakan sebuah kasus historis yang unik dan khas: sebuah kawasan transmigrasi yang mengadopsi kerangka kelambagaan nagari Minangkabau termasuk falsafah adat Basandi syara', syara' basandi kitabullah dan lembaga KAN, namun dijalankan dan dipipin oleh kelompok etnis pendatang yang secara struktural berada diluar sistem adat matrilineal Minangkabau. Keberhasilan model kepemimpinan semacam innilah dalam menjaga stabilitas sosial ditengah keberagaman etnis menjadikan Nagari Desa Baru sebagi model pembelajaran berharga menegenai integrasi sosial dikawasan transmigrasi multienis di indonesia.

B. Saran

Bagi Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Desa Baru, disarankan untuk terus mendokumentasikan dan melestarikan sejarah lisan mengenai proses kolonisasi, transmigrasi, dan dinamika kepemimpinan lokal sepanjang tiga fase pemerintahan, mengingat sebagian besar informan kunci seperti Klinem yang telah berusia 106 tahun merupakan generasi pertama transmigran yang jumlahnya semakin terbatas.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berminat mendalami Fase Orde Lama (1954–1966) yang dalam penelitian ini hanya dapat ditelusuri melalui sumber dokumenter, disarankan menelusuri arsip statis pemerintahan nagari di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat serta Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, guna memperkaya rekonstruksi kepemimpinan lokal pada fase awal tersebut.

Bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, disarankan untuk terus mendukung program pelestarian kelembagaan adat di kawasan-kawasan bekas transmigrasi seperti Nagari Desa Baru, sebagaimana telah dirintis pada masa kepemimpinan Bupati Baharuddin R. dan Bupati Syahiran pada Fase Reformasi, agar nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah tetap terjaga tanpa mengabaikan realitas kemajemukan etnis yang menjadi kekhasan daerah tersebut.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Bagi masyarakat Nagari Desa Baru, disarankan untuk terus menjaga dan merawat modal sosial berupa toleransi antaretnis, tradisi gotong royong, dan keterbukaan terhadap perkawinan lintas etnis yang telah terbukti menjadi faktor utama terciptanya harmoni sosial melintasi tiga fase pemerintahan yang berbeda, di tengah kecenderungan pergeseran sebagian tradisi seperti beralihnya gotong royong tenaga menjadi iuran uang akibat perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam.* Yogyakarta: Ombak, 2011.

Arifin, Tarjul. *Metodologi Penelitian Sejarah.* Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Ashfahrizal. "Sejarah Perkebunan Kelapa Sawit Ophir dari Onderneming hingga." Skripsi, Fakultas Sastra, Universitas Andalas, Padang, 1996.

Bell, Peter F. *The Political Economy of the Indonesian Transmigration Program.* Honolulu: University of Hawaii Press, 1987.

Budianto, Aan. "Ketegangan Sosial di Lampung Akibat Program Transmigrasi di Era 1950." *Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah* 20, no. 1 (Maret 2020): 18.

Dekrit Presiden Republik Indonesia, 5 Juli 1959.

"Desa Baru, Ranah Batahan, Pasaman Barat." Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia. Diakses 6 Agustus 2026.

Esman. *Monografi Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.* 2020.

Fahrezi. *Pemerintahan Lokal Berbeda Etnis: Studi Model Pelaksanaan Pemerintahan Nagari Beretnis Mandailing dan Jawa di Kabupaten Pasaman Barat.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.

Hafid, Abdul. "Hubungan Sosial Masyarakat Multietnik di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan." *Jurnal Al-Qalam* 22, no. 1 (Juni 2016)

Halim, Abdul. *Sosiologi Politik Etnik: Studi Otoritas dan Demokrasi Lokal Masyarakat Madura.* Malang: Intelegensi Media, 2019.

Herdiani, Een. “Metode Sejarah dalam Penelitian Tari.” *Jurnal Ilmiah Seni Makalangan* 3, no. 2. 2016

Herlina, Nina. *Metode Sejarah.* Bandung: Satya Historika, 2020.

Hidayati, Mailiza. “Kehidupan Masyarakat Transmigran Suku Jawa di Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 1975–2005.” Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022.

Ikhsanuddin. Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Desa Baru. Wawancara pribadi. Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026.

Indrayani, Nelly, dan Ahmad Khoirul Na’im. “Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat Transmigran Jawa di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo 1976–2015.” *Jejak: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah* 1, no. 2, Desember 2021

Indrayani, Nelly, dan Supian Ramli. “Transmigrasi dan Kristenisasi di Pasaman.” *Jurnal Pendidikan Sejarah* XII , 2023

Joko, Sayono. “Langkah-Langkah Heuristik dalam Konteks Metode Sejarah di Era Digital.” *Sejarah dan Budaya*, 2021

“Kajian Yuridis terhadap Kedudukan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Kato, Tsuyoshi. *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah.* Diterjemahkan oleh Gusti Asnan dan Akiko Iwata. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Klinem. Transmigran asal Jawa Tengah. Wawancara pribadi. Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah.* Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001.

Kurniasari, Sara. "Adaptasi Masyarakat Transmigrasi Jawa terhadap Kebudayaan Jambi di Desa Wanareja Rimbo Ulu Tebo 1978–1990." Skripsi, Universitas Jambi, 2024.

Laksono, Anton Dwi. *Apa Itu: Sejarah, Pengertian, Ruang Lingkup, Metode, dan Penelitian.* Drewati Press, 2018.

Lindberg, Monica O. "Integrasi dan Konflik Permukiman Transmigrasi: Studi Kasus dari Lampung." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 155, no. 3 (1999)

Louis. *Mengerti Sejarah.* Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press, 1986.

Mawaddah, Elsa, dan Suriani. "Kehidupan Sosial Transmigrasi Jawa di Pemukiman Baru II Kenegarian Parit Kabupaten Pasaman Barat Tahun 1993–1994." *Jurnal Transformasi Pendidikan dan Pembelajaran* 9, no. 4 (November 2025): 40.

May, Eni. "Potret 3 Desa Transmigrasi Orang Jawa: Studi Kasus di Desa Tongar, Koja dan Desa Baru Pasaman Sumatera Barat." Laporan Penelitian, Universitas Andalas, Padang, 2006.

Naim, Mochtar. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979.

Nanda, Salsabila. "5 Tahapan Penelitian Sejarah Menurut Ahli dan Contohnya." *Ruangguru*, 10 Oktober 2024.

Nizaruddin. Mantan Sekretaris Desa Baru dan anggota Bamus pada masa Nagari. Wawancara pribadi. Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026.

Nova, Yoso. “Dampak Transmigrasi terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya.” *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 5, no. 1, Januari–Juni 2016

Octavania, Vanni. “Jerman di Bawah Pemerintahan Adolf Hitler (Kajian Historis tentang Gerakan Oposisi terhadap Pemerintahan Adolf Hitler pada Tahun 1933–1945).” Skripsi S-1, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2015.

Pemerintah Nagari Desa Baru. “Profil Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.” Dokumen monografi internal nagari, 2015–2025.

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Pranoto, Suhartono W. *Teori dan Metodologi Sejarah.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Purba, Yudhi Zuriah Wirya, dan Wardi Saleh. “Transmigrasi Sebagai Upaya Pertanian.” *Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI)* 1, no. 1 (Februari 2023): 71.

Sampir. Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Desa Baru. Wawancara pribadi. Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026.

“Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia.” Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia.

“Sejarah Singkat Otonomi Daerah: Pasang Surut Jejak Sejarah Kebijakan.” Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Setiabasith, Dzaki. “Pola Migrasi Intergenerasi Transmigran Jawa di Lampung: Analisis Karakteristik dan Perkembangan Kehidupan.” *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 9, no. 2 , 2025

Shamad, Irhash A. *Hegemoni Politik Pusat dan Kemandirian Etnik di Daerah: Kepemimpinan Sumatera Barat di Masa Orde Baru.* Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 2001.

Spitz, Pierre. "Transmigrasi di Indonesia: Kasus Lamtoron." *Pembangunan dan Perubahan* 13, no. 2 (1982): 249–276.

Sugihen, Bahrein T. *Sosiologi Pedesaan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Sukri. Mantan Sekretaris Nagari Desa Baru, kini Sekretaris Desa Baru Barat. Wawancara pribadi. Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026.

Suryadi. Keturunan transmigran Jawa. Wawancara pribadi. Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026.

Susetyo, dkk. "Kebijakan Transmigrasi dalam Kerangka Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 25, no. 2, Article 1. https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v25i2.1034.

Tarmini dan Sawale. Pasangan transmigran asal Pekalongan. Wawancara pribadi. Nagari Desa Baru, 13 Juni 2026.

Tirtosudarmo, Riwanto. "Program Transmigrasi Indonesia: Dari Ideologi Menuju Realitas." Dalam *Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia*, disunting oleh Gavin W. Jones dan R. M. Douglas, 123–145. Singapura: Oxford University Press, 1991.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undri. "Migrasi dan Interaksi antara Etnis di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 4, no. 2 2018

Wahyuni, Nyata. "Peran Transmigrasi Etnis Jawa dalam Mengembangkan Pendidikan di Desa Kotaraya Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Mautong." Skripsi, Universitas Tadulako, 2021.

Yuliantri, Ela. "Pola Kemitraan Tanam Saham dalam Pertanian Jagung Ditinjau dari Fiqih Muamalah Mengenai Sejarah Kolonisasi." Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang, 2024.

Zainuddin, Musyair. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau.* Yogyakarta: Ombak, 2008.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zubir, Zaiyardam. *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan.* Yogyakarta: Insist Press, 2002.